

ANALISIS PELAKSANAAN TATA KELOLA EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK



Oleh:
Tim Studi

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
TAHUN 2010**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rahmatNya sehingga kegiatan analisis tentang tata kelola perusahaan pada Emiten dan Perusahaan Publik khususnya oleh dewan komisaris dan direksi telah selesai dilakukan hingga laporan hasil studi ini tersusun.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) bukanlah suatu proses yang mudah. Diperlukan pemahaman, komitmen dan konsistensi dari seluruh organ perusahaan khususnya direksi dan dewan komisaris untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam mengelola perusahaana. Dengan demikian nilai tambah yang diharapkan oleh *shareholder* dan *stakeholder* perusahaan baik finansial maupun non finansial dapat tercapai. Kegiatan analisis pelaksanaan tata kelola ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan pada Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana diungkapkan dalam laporan tahunan. Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan kebijakan dan meningkatkan praktik *Good Corporate Governance* oleh Emiten dan Perusahaan Publik.

Kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat dihargai sebagai masukan dalam menyempurnakan hasil studi ini.

Jakarta, Desember 2010

Tim Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Emiten dan
Perusahaan Publik

TIM ANALISIS PELAKSANAAN TATA KELOLA EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK

Ketua Tim Kajian :

1. Lasdini Purwanti

Anggota :

1. Evie Sulistyani

2. Ni Nyoman Puspani

3. Zulhasni

4. Rahmat Fatagar

5. Budhy Azhari

6. Ejen Zainuddin

7. Yunaldi Boer

8. Ahmadsah Sidik

9. Aryo Yoga Pratama

10. Gabena Rambe

11. Nurhaeni

12. Rusdian Helmiandy

13. Subiyah

14. Wina Sasra Wita

15. Mustafa lutfi

Executive Summary

Kegiatan analisis pelaksanaan tata kelola ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan pada Emiten dan Perusahaan Publik khususnya dewan komisaris, direksi dan komite audit sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bapepam-LK No.X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Selain itu kegiatan ini juga dilakukan untuk membandingkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang dilakukan dan diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik tahun 2008 dengan pelaksanaan di tahun 2009. Selanjutnya hasil analisis ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan kebijakan dan peningkatan praktik *Good corporate governance* bagi Emiten dan Perusahaan Publik.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Data yang digunakan diambil dari laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik tahun 2009 berjumlah 422 perusahaan dari 469 Emiten dan Perusahaan Publik. Data yang digunakan meliputi jumlah komisaris termasuk komisaris independen, direksi, komite audit dan komite-komite lain yang dimiliki perusahaan, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran dari komisaris, direksi dan anggota komite audit termasuk juga data Unit Audit Internal, kode etik perusahaan, jumlah pemegang saham di atas 5% dan pemegang saham publik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa belum seluruh Emiten dan Perusahaan Publik mengungkapkan pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam laporannya. Data mengenai pengungkapan atas pelaksanaan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik mengingat 257 Emiten/Perusahaan Publik (59,32%) mengungkapkan frekuensi rapat dewan komisaris namun hanya 213 Perusahaan (50,47%) yang mengungkapkan tingkat keahadirannya. Untuk frekuensi rapat direksi diungkapkan oleh 262 Perusahaan (62,08%) namun hanya 215 Perusahaan (50,95%) yang mengungkapkan tingkat keahadirannya. Sementara frekuensi rapat komite audit diungkapkan oleh 206 Perusahaan (48,82%) namun hanya 177 Perusahaan (41,94%) yang mengungkapkan tingkat keahadirannya.

Sebanyak 395 Emiten dan Perusahaan Publik (93,60%) mengungkapkan keberadaan dan jumlah anggota Komite Audit dalam perusahaan. sebanyak 27 perusahaan hanya memiliki komite audit dengan jumlah anggota 1 sampai 2 orang saja. Hal ini belum memenuhi batasan minimal jumlah anggota Komite Audit sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yaitu 3 orang. Sedangkan sebanyak 27 Emiten dan Perusahaan Publik (6,40%) tidak mengungkapkannya. Namun demikian belum diketahui secara pasti apakah dari 27 perusahaan tersebut apakah seluruhnya tidak memiliki komite audit mengingat tidak dilakukan konfirmasi secara langsung kepada Emiten/Perusahaan Publik. Sebanyak 368 Emiten dan Perusahaan Publik (91,46%) mempunyai jumlah anggota komite audit sebanyak 3 sampai dengan 7 orang. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan diungkapkan oleh 394 Emiten dan Perusahaan Publik (93,36%) hanya 28 Emiten dan Perusahaan Publik (6,63%) yang belum mengungkapkan. Sedangkan keberadaan Unit Audit Internal hanya diungkapkan oleh 143 perusahaan (33,88%).

Sebanyak 122 Emiten dan Perusahaan Publik (28,91%) mengungkapkan komite-komite selain komite audit yang dimiliki oleh perusahaan, seperti komite nominasi, komite remunerasi, komite risiko, komite Good Corporate Governance, komite CSR, dan lain-lain. Jumlah komite lain yang dimiliki Emiten dan Perusahaan Publik berkisar antara satu sampai dengan 12 komite.

Keterbukaan mengenai remunerasi dewan komisaris dan direksi pada umumnya diungkapkan secara total tidak per individu. Jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang mengungkapkan remunerasi tersebut hanya 291 perusahaan (68,95%).

Bagi Emiten dan Perusahaan Publik yang belum mengungkapkan dalam laporan tahunan mengenai keberadaan komite audit dan unit audit internal sesuai dengan ketentuan Bapepam-LK yang berlaku perlu penelaahan lebih lanjut oleh Biro PKP Sektor Jasa dan Sektor Riil mengingat dalam kegiatan ini tidak dilakukan konfirmasi secara langsung terhadap Emiten dan Perusahaan publik yang tidak mengungkapkan hal tersebut dalam laporan tahunannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM ANALISIS PELAKSANAAN TATA KELOLA EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK	ii
EXECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Kegiatan.....	1
C. Metode Analisis	2
D. Model Statistik	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Defenisi Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance).....	5
B. Organ Perusahaan	8
C. Keterbukaan Informasi mengenai Implementasi Praktik Good Corporate Governance oleh Emiten dan Perusahaan Publik	11
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	13
A. Gambaran Hasil Analisis.....	13
BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI	59
A. Simpulan	59
B. Rekomendasi.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Organ Perusahaan dan Organ Pendukung Perusahaan pada Emiten/PP	14
Tabel.3.2. Jumlah Anggota Dewan Komisaris Emiten/Perusahaan Publik.....	15
Tabel 3.3. Jumlah Anggota Dewan Komisaris pada Emiten/PP Sektor Jasa	15
Tabel 3.4. Jumlah Anggota Dewan Komisaris pada Emiten/PP Sektor Riil.....	15
Tabel.3.5. Jumlah Komisaris yang Terafiliasi pada Emiten/Perusahaan Publik	16
Tabel 3.6. Jumlah Komisaris yang Terafiliasi pada Emiten/PP Sektor Jasa.....	17
Tabel 3.7. Jumlah Komisaris yang Terafiliasi pada Emiten/PP Sektor Riil	17
Tabel.3.8. Jumlah Komisaris Independen pada Emiten/Perusahaan Publik	18
Tabel.3.9. Jumlah Komisaris Independen pada Emiten/PP Sektor Jasa.....	18
Tabel.3.10. Jumlah Komisaris Independen pada Emiten/PP Sektor Riil	19
Tabel.3.11. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam 1 tahun pada Emiten/PP	20
Tabel.3.12. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam 1 tahun pada Sektor Jasa	20
Tabel.3.13. Jumlah Rapat Dewan Komisaris pada Emiten/PP Sektor Riil	20
Tabel.3.14. Jumlah kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris selama 1 tahun pada Emiten/Perusahaan Publik	22
Tabel.3.15. Jumlah kehadiran Anggota Dewan dalam Komisaris Rapat Dewan Komisaris pada Emiten/PP Sektor Jasa.....	22
Tabel.3.16. Jumlah kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris pada Emiten/PP Sektor Riil	22
Tabel.3.17. Jumlah Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi selama 1 tahun pada Emiten/Perusahaan Publik	24
Tabel.3.18. Jumlah Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi pada Emiten/PP Sektor Jasa.....	24
Tabel.3.19. Jumlah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi pada Sektor Riil	24
Tabel.3.20. Jumlah kehadiran Komisaris dalam Rapat Gabungan selama 1 tahun pada Emiten/Perusahaan Publik	25
Tabel.3.21. Jumlah kehadiran Komisaris dalam Rapat Gabungan pada Emiten/PP Sektor Jasa.....	25
Tabel.3.22. Jumlah kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan pada Emiten/PP Sektor Riil.....	26
Tabel.3.23. Jumlah Anggota Komite Audit pada Emiten/Perusahaan Publik	27
Tabel.3.24. Jumlah Anggota Komite Audit pada Emiten/PP Sektor Jasa	27
Tabel.3.25. Jumlah Anggota Komite Audit pada Emiten/PP Sektor Riil	28
Tabel.3.26. Jumlah Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten/Perusahaan Publik	29

Tabel.3.27. Jumlah Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen pada Sektor Jasa ..	29
Tabel.3.28. Jumlah Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen pada Sektor Riil.....	29
Tabel.3.29. Jumlah Rapat Komite Audit dalam 1 tahun pada Emiten/Perusahaan Publik.....	31
Tabel.3.30. Jumlah Rapat Komite Audit dalam 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Jasa	31
Tabel.3.31. Jumlah Rapat Komite Audit dalam 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Riil.....	31
Tabel.3.32. Jumlah Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit selama 1 tahun pada Emiten/Perusahaan Publik.....	32
Tabel.3.33. Jumlah Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit pada Emiten/PP Sektor Jasa	33
Tabel.3.34. Jumlah Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit pada Emiten/PP Sektor Riil.....	33
Tabel.3.35. Jumlah Komite Lain yang dibentuk selain komite audit pada Emiten/PP.....	34
Tabel.3.36. Jumlah Komite Lain yang dibentuk selain komite audit pada Emiten/PP Sektor Jasa	34
Tabel.3.37. Jumlah Komite Lain yang dibentuk selain komite audit pada Emiten/PP Sektor Riil	35
Tabel 3.38 Jenis-Jenis Komite Lain yang dibentuk selain komite audit pada Emiten/PP	36
Tabel.3.39. Jumlah Direksi pada Emiten/Perusahaan Publik.....	37
Tabel.3.40. Jumlah Direksi pada Emiten/PP Sektor Jasa.....	37
Tabel.3.41. Jumlah Direksi pada Emiten/PP Sektor Riil.....	38
Tabel.3.42. Jumlah Anggota Direksi yg merupakan pihak Independen dari Emiten/ PP	38
Tabel.3.43. Jumlah Anggota Direksi yg merupakan pihak Independen dari pada Emiten/PP Sektor Jasa	39
Tabel.3.44. Jumlah Anggota Direksi yg merupakan pihak Independen dari pada Emiten/PP Sektor Riil.....	39
Tabel.3.45. Jumlah Rapat Direksi selama 1 tahun pada Emiten/Perusahaan Publik	40
Tabel.3.46. Jumlah Rapat Direksi selama 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Jasa.....	40
Tabel.3.47. Jumlah Rapat Direksi selama 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Riil	41
Tabel.3.48. Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Direksi selama 1 tahun pada Emiten/Perusahaan Publik	42
Tabel.3.49. Jumlah kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat direksi pada Sektor Jasa	42
Tabel.3.50 Jumlah kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat direksi pada Sektor Riil	42
Tabel.3.51. Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi selama 1 tahun pada Emiten/Perusahaan Publik	43
Tabel.3.52. Jumlah kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat gabungan pada Sektor Jasa	44
Tabel.3.53. Jumlah kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat gabungan pada Sektor Riil.....	44
Tabel.3.54 Pengungkapan dan Jumlah Anggota Unit Audit Internal Emiten/PP.....	45
Tabel.3.55 Pengungkapan dan Jumlah Anggota Unit Audit Internal pada Sektor Jasa	45
Tabel.3.56 Pengungkapan dan Jumlah Anggota Unit Audit Internal pada Sektor Riil.....	46

Tabel.3.57 Jumlah Pihak Pemegang Saham 5% atau lebih pada Emiten/PP	47
Tabel.3.58 Jumlah Pihak Pemegang Saham 5% atau lebih pada Emiten/PP Sektor Jasa	47
Tabel.3.59 Jumlah Pihak Pemegang Saham 5% atau lebih pada Emiten/PP Sektor Riil	47
Tabel.3.60 Jumlah Prosentase Saham yang dimiliki Masyarakat/Publik pada Emiten/PP	48
Tabel.3.61 Jumlah Prosentase Saham yang dimiliki Masyarakat/Publik pada Sektor Jasa	49
Tabel.3.62 Jumlah Prosentase Saham yang dimiliki Masyarakat/Publik pada Sektor Riil	49
Tabel.3.63 Pengungkapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Emiten/PP	50
Tabel.3.64 Pengungkapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi pada Sektor Jasa	50
Tabel.3.65 Pengungkapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi pada Sektor Riil	51
Tabel.3.66 Pengungkapan Kode Etik Perusahaan pada Emiten/Perusahaan Publik	52
Tabel.3.67 Pengungkapan Kode Etik Perusahaan pada Emiten/PP Sektor Jasa.....	52
Tabel.3.68 Pengungkapan Kode Etik Perusahaan pada Emiten/PP Sektor Riil	53
Tabel 3.69 Kepemilikan Organ Perusahaan dan Pendukung Organ Perusahaan pada Sektor Jasa	54
Tabel 3.70. Kepemilikan Organ Perusahaan Dan Pendukung Organ Perusahaan pada Sektor Riil.....	56
Tabel 3.71 Perbandingan Hasil Analisis Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik Tahun 2009 dan Tahun 2008	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik.3.1	Jumlah Anggota Dewan Komisaris pada Emiten/Perusahaan Publik	16
Grafik.3.2	Jumlah Anggota Dewan Komisaris Terafiliasi Emiten/Perusahaan Publik	17
Grafik.3.3	Jumlah Komisaris Independen pada Emiten/Perusahaan Publik.....	19
Grafik.3.4	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam 1 tahun pada Emiten/PP	21
Grafik.3.5	Jumlah Kehadiran Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris selama 1 tahun	23
Grafik.3.6	Jumlah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi selama 1 tahun	25
Grafik.3.7	Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan selama 1 tahun ...	26
Grafik.3.8	Jumlah Anggota Komite Audit pada Emiten/Perusahaan Publik	28
Grafik.3.9	Jumlah Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen.....	29
Grafik.3.10	Jumlah Rapat Komite Audit selama 1 tahun pada Emiten/Perusahaan Publik	32
Grafik.3.11	Jumlah Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat selama 1 tahun.....	33
Grafik.3.12	Jumlah komite lain yang dibentuk selain komite audit	35
Grafik 3.13.	Jumlah Direksi pada Emiten/Perusahaan Publik.....	38
Grafik 3.14.	Jumlah Anggota Direksi yang merupakan pihak Independen.....	39
Grafik 3.15.	Jumlah Rapat Direksi selama 1 tahun.....	41
Grafik 3.16.	Jumlah Kehadiran Direksi dalam rapat selama 1 tahun	43
Grafik 3.17.	Jumlah Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris selama 1 tahun	44
Grafik 3.18.	Jumlah Anggota Unit Audit Internal.....	46
Grafik 3.19.	Jumlah Pihak pemegang saham 5 % atau lebih pada Emiten/Perusahaan Publik	48
Grafik 3.20.	Jumlah Prosentase saham yang dimiliki oleh Masyarakat/Publik	49
Grafik 3.21.	Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap perusahaan memiliki visi dan misi dari keberadaannya. Visi dan misi tersebut merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan usaha yang akan dilakukannya dan tentunya harus terencana dan terprogram dengan baik. Ketika mencapai tujuan tersebut maka diperlukan keberadaan sistem tatakelola perusahaan yang baik dengan cara membangun dan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam proses manajerial perusahaan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) bukanlah suatu proses yang mudah. Diperlukan pemahaman, komitmen dan konsistensi dari seluruh organ perusahaan khususnya direksi dan dewan komisaris mengenai bagaimana seharusnya proses tersebut dijalankan. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya.

Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tata kelola perusahaan yang telah dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pemenuhan asas-asas dalam GCG, maka diperlukan adanya suatu analisis atas pelaksanaan tata kelola perusahaan berdasarkan data-data yang tertuang dalam Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik. Dari hasil analisis ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana Emiten dan Perusahaan Publik telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di dalam mengelola perusahaan.

B. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan pada Emiten dan Perusahaan Publik termasuk pengungkapannya di dalam laporan tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bapepam-LK No.X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan. Selain itu kegiatan ini juga dilakukan untuk membandingkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang dilakukan dan diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik tahun 2008 dengan pelaksanaan di tahun 2009. Selanjutnya hasil analisis ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan kebijakan dan peningkatan praktik *Good corporate governance* bagi Emiten dan Perusahaan Publik.

C. METODE ANALISIS

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam studi ini adalah laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik tahun 2009. Berdasarkan data Emiten dan Perusahaan Publik yang diperoleh dari Biro PKP Sektor Jasa dan Sektor Riil, jumlah Emiten dan Perusahaan Publik per 30 Juni 2010 sebanyak 469. Namun jumlah Laporan Tahunan 2009 Emiten dan Perusahaan Publik yang telah diterima Bapepam-LK per 30 Juni 2010 adalah 422 yang terdiri dari 245 Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa dan 177 Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil.

2. Jenis data

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data mengenai pelaksanaan Tata Kelola yang diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana diatur Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan. Adapun jenis data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Informasi keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, terdiri dari :
 - 1) Total Aset;
 - 2) Tingkat pengembalian Asset atau ROA (Return on Asset);
 - 3) ROE (Return on Equity);
 - 4) Total Ekuitas;
 - 5) Laba (Rugi) bersih setelah Pajak.
- b. Komposisi pemegang saham, mencakup informasi :
 - 1) Jumlah pihak yang mempunyai kepemilikan saham 5% atau lebih;
 - 2) Persentase kepemilikan pemegang saham publik;
 - 3) Persentase kepemilikan komisaris;
 - 4) Persentase kepemilikan direksi.
- c. Dewan Komisaris, mencakup informasi :
 - 1) Jumlah anggota dewan komisaris;
 - 2) Jumlah komisaris yang terafiliasi dengan Emiten/Perusahaan Publik;
 - 3) Jumlah komisaris independen.
 - 4) Jumlah remunerasi
- d. Rapat dewan komisaris, mencakup informasi :
 - 1) Jumlah rapat dewan komisaris dalam 1 tahun;
 - 2) Jumlah kehadiran dewan komisaris dalam rapat;
 - 3) Jumlah rapat gabungan dewan komisaris dan direksi;

- 4) Jumlah kehadiran dewan komisaris dalam rapat gabungan.
- e. Direksi, mencakup :
 - 1) Jumlah anggota direksi;
 - 2) Jumlah direktur independen.
 - 3) Jumlah remunerasi
- f. Rapat Direksi, mencakup :
 - 1) Jumlah rapat Direksi dalam 1 tahun;
 - 2) Jumlah kehadiran Direksi dalam rapat;
 - 3) Jumlah kehadiran Direksi dalam rapat gabungan dewan komisaris dan direksi.
- g. Komite Audit, mencakup informasi :
 - 1) Jumlah anggota Komite Audit;
 - 2) Jumlah anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen;
 - 3) Jumlah rapat Komite Audit;
 - 4) Jumlah kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat.
- h. Jenis komite-komite lain yang dimiliki perusahaan
- i. Unit Audit Internal, mencakup informasi :
 - 1) Keberadaan Unit Audit Internal Emiten dan Perusahaan Publik;
 - 2) Jumlah Anggota Unit Audit Internal Emiten dan Perusahaan Publik;
- j. Kode Etik Perusahaan

3. Pengelompokan data

Data yang digunakan dalam analisis ini di kelompokkan sesuai dengan jenis industrinya yang terbagi dalam dua sektor yaitu sektor jasa dan sektor riil. Pada sektor jasa dikelompokkan lagi menjadi 11 (sebelas) industri sebagai berikut:

- a. Perbankan
- b. Asuransi
- c. Sekuritas dan Investasi
- d. Pembiayaan
- e. Perdagangan
- f. Media dan Teknologi Informasi
- g. Properti dan Real Estate
- h. Konstruksi, Jasa lainnya
- i. Pariwisata & Perhotelan
- j. Perhubungan/Transportasi
- k. Telekomunikasi

Untuk sektor riil dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) industri sebagai berikut:

- a. Tekstil dan garment
- b. Alas kaki
- c. Barang Konsumsi
- d. Aneka Industri Lainnya
- e. Industri Dasar
- f. Industri Logam
- g. Industri Kimia
- h. Pertambangan
- i. Agribisnis

D. Model Statistik

Kajian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Metode ini berfungsi menjelaskan keadaan, gejala, atau persoalan yang berasal dari data-data yang digunakan. Penarikan kesimpulan pada statistik deskriptif hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Secara umum, *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders perusahaan. Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa *Good Corporate Governance* adalah proses pengelolaan perusahaan, yang dilandasi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, implementasi, kewajaran dan kesetaraan. Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, menguraikan prinsip-prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi termasuk hal-hal penting bagi pengambilan keputusan pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk dapat memberikan jaminan adanya transparansi ini perusahaan harus mengimplementasikan hal sebagai berikut:

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Implementasi pelaksanaan akuntabilitas ini dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.

3. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Implementasi pelaksanaan responsibilitas ini dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
- b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan

tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Implementasi pelaksanaan prinsip tanggung jawab ini dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Implementasi pelaksanaan prinsip *fainness* ini dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Secara umum, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh semua organisasi yang mengembangkan *Good Corporate Governance* baik nasional maupun internasional memiliki prinsip dasar yang sama dan bertujuan untuk:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas *TARIF* dan kewajaran.
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan Good Corporate Governance pada dasarnya perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan adanya perilaku semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan (organ perusahaan) dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.

B. Organ Perusahaan

Organ perusahaan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Masing-masing organ tersebut mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Untuk mengetahui seberapa besar tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Organ Perusahaan tersebut dapat diuraikan sebagaimana di bawah ini:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ tertinggi yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat atas kebijakan direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan

pengurusan, jalannya pengurusan dan usaha perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi berdasarkan kepada kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Kewajiban Komisaris antara lain membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat dan melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham dan/atau keluarga atas saham Perseroan dan saham di Perseroan lainnya. Berdasarkan Pedoman GCG yang diterbitkan oleh KNKG, Rapat Komisaris diselenggarakan minimal satu kali dalam satu bulan. Selain melakukan rapat secara internal, Komisaris juga dapat melakukan rapat gabungan dengan mengundang pihak Direksi berikut Internal Auditor serta Komite-komite dibawah Komisaris. Setiap Rapat dibuatkan risalah rapat yang menggambarkan jalannya rapat dan diadministrasikan sebagaimana dokumen Perusahaan lainnya.

UUPT menyatakan pula bahwa perseroan dapat mengatur adanya satu orang atau lebih Komisaris Independen yang merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Bagi Emiten dan Perusahaan Publik, keberadaan komisaris independen diwajibkan oleh Bapepam-LK melalui peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Emiten dan Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, Komisaris dapat membentuk beberapa komite sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dengan tetap mempertimbangkan efektivitas komite tersebut dalam mendukung kinerja Perusahaan. Dari hasil analisis atas Laporan Tahunan 2008 Emiten dan Perusahaan Publik yang terdaftar di Bapepam-LK, terdapat berbagai macam jenis komite yang membantu pelaksanaan kerja Dewan Komisaris selain Komite Audit. Jumlah komite yang dibentuk tergantung ukuran, sektor bisnis dan kebutuhan perseroan. Komite-komite yang dibentuk Komisaris dimaksud antara lain :

- Komite: ALCO
- Komite: business development and marketing
- Komite: Disclosure
- Komite: Eksekutif
- Komite: ESOP
- Komite: Etika dan Disiplin
- Komite: Foreign Exchange
- Komite: GCG
- Komite: Nominasi
- Komite: Remunerasi
- Komite: Operasional
- Komite: Pengadaan
- Komite: Pengawasan Internal
- Komite: Promosi
- Komite: Pengembangan Staff
- Komite: Produk

- Komite: Handi Kep
- Komite: Image
- Komite: Investasi
- Komite: kebijakan kredit
- Komite: Keselamatan Kerja
- Komite: Klub
- Komite: Komunikasi
- Komite: Lelang
- Komite: Panitia Penl. Pekrjn Terbaik
- Komite: Margin
- Komite: Monitoring Penerapan Basel
- Komite: Asuransi, Risiko Usaha dan Pasca Tambang
- Komite: Pengelolaan Anak Perusahaan
- Komite: Regulasi
- Komite: Oversight
- Komite: rencana kerja& anggaran
- Komite: Risiko
- Komite: SDM
- Komite: Tanggung Jawab Sosial
- Komite: Tariff & Pricing
- Komite: Tender
- Komite: Kompensasi
- Komite: benturan kepentingan
- Komite: Kepatuhan
- Komite: Majm. Pengarah Teknologi Informasi

3. Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perseroan agar seluruh sumber daya berfungsi secara maksimal sehingga mampu meningkatkan profitabilitas operasional dan memberikan hasil akhir berupa peningkatan nilai perseroan secara berkesinambungan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Komposisi Direksi ditentukan sedemikian rupa untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat serta memungkinkan Direksi untuk bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kapasitasnya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.

Rapat dewan direksi berperan penting dalam proses pengelolaan perusahaan. Dalam rapat tersebut diharapkan dapat disusun kebijakan dan kegiatan perusahaan serta pemecahan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan. Umumnya, rapat Direksi diselenggarakan secara rutin minimum sekali dalam satu bulan. Setiap Rapat Direksi selalu dibuatkan risalah rapat yang menggambarkan jalannya rapat dan hasil rapat. Risalah rapat asli diadministrasikan sebagaimana dokumen Perusahaan lainnya.

C. Keterbukaan Informasi mengenai Implementasi Praktik Good Corporate Governance oleh Emiten dan Perusahaan Publik

Pengungkapan informasi mengenai penerapan tata kelola perusahaan telah diatur dalam peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan ketentuan tersebut Emiten dan Perusahaan Publik diwajibkan untuk mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dewan komisaris

Informasi mengenai dewan komisaris mencakup antara lain:

- a. uraian pelaksanaan tugas dewan komisaris;
- b. pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota dewan komisaris; dan
- c. frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran dewan komisaris;

2. Direksi

Informasi mengenai direksi antara lain meliputi:

- a. ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi;
- b. pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota direksi;
- c. frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota direksi; dan
- d. program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi;

3. Komite Audit

Informasi mengenai komite audit mencakup antara lain:

- a. nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit;
- b. uraian tugas dan tanggung jawab;
- c. frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran masing-masing anggota komite audit; dan
- d. laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit;

4. Komite-komite lain yang dimiliki oleh perusahaan (seperti: komite nominasi dan komite remunerasi), yang mencakup:

- a. nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite;
- b. independensi anggota komite;
- c. uraian tugas dan tanggung jawab;
- d. frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite; dan
- e. uraian pelaksanaan kegiatan komite;

5. Tugas dan fungsi sekretaris perusahaan

- a. nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat sekretaris perusahaan; dan
- b. uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan;

6. Sistem pengendalian interen yang diterapkan oleh perusahaan dan pelaksanaan pengawasan intern (internal control and audit);

7. Risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut
8. Aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan;
9. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris yang sedang menjabat, antara lain meliputi:
 - a. pokok perkara/gugatan;
 - b. kasus posisi;
 - c. status penyelesaian perkara/gugatan;
 - d. pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan; dan
10. Tempat/alamat yang dapat dihubungi pemegang saham atau masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN HASIL ANALISIS

Analisis ini didasarkan pada data yang diperoleh dari hasil penelaahan atas informasi dalam laporan tahunan 2009. Berdasarkan data per 30 Juni 2010, jumlah Emiten dan Perusahaan Publik adalah 469 perusahaan. Namun jumlah Laporan Tahunan 2009 Emiten dan Perusahaan Publik yang telah diterima Bapepam-LK per 30 Juni 2010 adalah 422 perusahaan terdiri dari 245 Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa dan 177 Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil.

Berdasarkan hasil penelaahan atas data-data tersebut diperoleh gambaran mengenai hal-hal sebagai berikut :

Tabel 3.1. Organ Perusahaan dan Komite Pendukung Organ Perusahaan pada Emiten/Perusahaan Publik

No.	Jenis Industri	Total Perusahaan	Jumlah Persentase yang mengungkapkan (%)																					
			Jumlah anggota Dewan Komisaris	Jumlah Komisaris Terafiliasi	Jumlah Komisaris Independen	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat selama 1 tahun	Jumlah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dalam 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan selama 1 tahun	Jumlah Anggota Komite Audit	Jumlah Anggota Komite Audit yang merupakar Komisaris Independen	Jumlah Rapat Komite Audit dalam 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat selama 1 tahun	Jumlah Komite Lain	Jumlah Direksi	Jumlah Direktur Independen	Jumlah Rapat Direksi dalam 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat selama 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Gabungan selama 1 tahun	Unit audit Internal	Jumlah Pihak Pemegang Saham 5% atau lebih	Jumlah Pemegang Saham Publik	Remunirasi Direksi dan Komisaris	Kode Etik Perusahaan
1	Sektor Jasa	245	245 (100%)	81 (33,06%)	293 (97,55%)	152 (62,04%)	130 (53,28%)	79 (32,24%)	68 (27,76%)	230 (93,88%)	209 (85,30%)	120 (48,98%)	103 (42,04%)	91 (37,43%)	245 (100%)	25 (10,20%)	151 (61,63%)	122 (49,79%)	69 (28,16%)	110 (44,89%)	241 (98,36%)	204 (83,26%)	168 (68,57%)	59 (24,08%)
			2-22 orang	1 sd 15	1 sd 7	1 sd 60	2 sd 293	1 sd 76	3 sd 129	1 sd 7	1 sd 4	2 sd 52	2 sd 241	1 sd 12	2 sd 11	1 sd 5	1 sd 118	4 sd 657	3 sd 110	1 sd 4	1 sd 7	0,04% sd 93,55%	16,978.953 sd 2.892.842.000,000	1 (Ada)
2	Sektor Riil	177	177 (100%)	22 (12,43%)	155 (87,57%)	105 (59,32%)	83 (46,89%)	58 (32,77%)	39 (22,03%)	165 (93,22%)	144 (81,35%)	86 (48,58%)	74 (41,8%)	31 (17,51%)	177 (100%)	15 (8,47%)	111 (62,7%)	93 (52,54%)	41 (23,165)	33 (18,64%)	177 (100%)	157 (88,70%)	123 (69,49%)	27 (15,25%)
			2-10 Orang	1-6 Orang	1 sd 5	1 sd 38	1 s.d 126	1 s.d 46	2 s.d 126	1 s/d 8	1 s/d 7	1 s/d 43	3 s/d 100	1 s/d 7	2 s/d 11	1 s.d 3	1 s/d 50	4 sd 294	4 s/d 105	1	1 s/d 12	0,04% s/d 82,13%	157.404.000 s/d 2.892.842.000,000	1 (Ada)
TOTAL			422 (100%)	103 (24,41%)	394 (93,36%)	257 (60,9%)	213 (50,47%)	137 (32,46%)	107 (25,36%)	395 (93,60%)	353 (83,55%)	206 (48,82%)	177 (41,94%)	122 (28,91%)	422 (100%)	40 (9,47%)	262 (62,08%)	215 (50,95%)	110 (26,06%)	143 (33,88%)	418 (99,05%)	361 (85,55%)	291 (68,95%)	86 (20,37%)

1. Dewan Komisaris

Tabel 3.2. Jumlah Anggota Dewan Komisaris Emiten/Perusahaan Publik

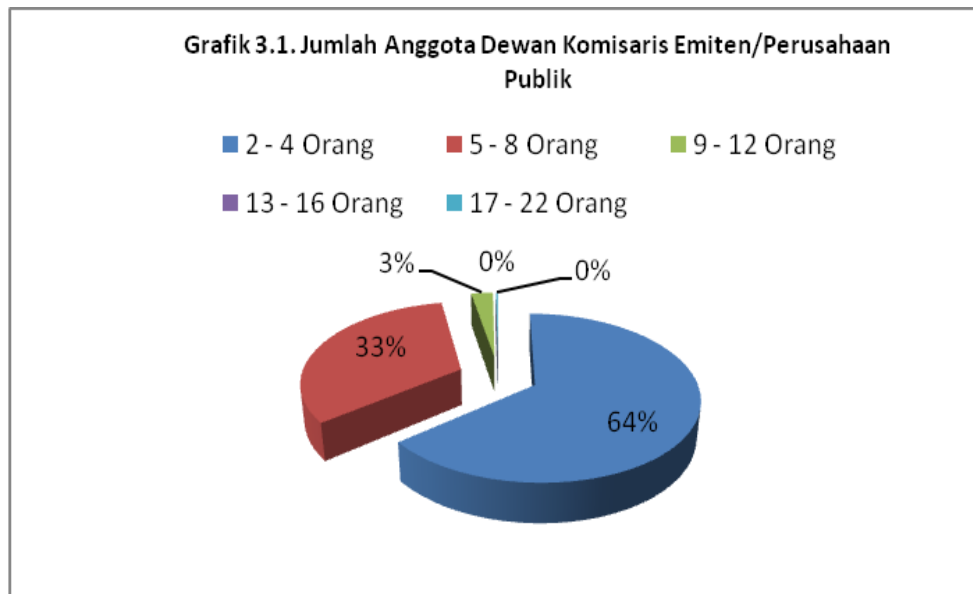
No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan jumlah anggota Dewan Komisaris	(%)	Jml Dekom
1.	Sektor Jasa	245	245	100	2-22
2.	Sektor Riil	177	177	100	2-10
	TOTAL	422	422	100	

Tabel 3.3. Jumlah Dewan Komisaris pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Dekom
1.	Perbankan	33	33	100	2-8
2.	Asuransi	11	11	100	2-5
3.	Sekuritas dan Investasi	26	26	100	2-6
4.	Pembiayaan	22	22	100	2-8
5.	Perdagangan	35	35	100	2-9
6.	Media dan teknologi Informasi	16	16	100	2-8
7.	Properti dan real Estate	46	46	100	2-22
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	11	100	2-8
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	20	100	2-7
10.	Perhubungan/transportasi	18	18	100	2-9
11.	Telekomunikasi	7	7	100	2-10
	TOTAL	245			

Tabel 3.4. Jumlah Dewan Komisaris pada Emiten/PP Sektor Riil

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Dekom
1.	Tekstil & Garment	20	20	100	2-9
2.	Alas Kaki	3	3	100	3-5
3.	Barang Konsumsi	32	32	100	2-10
4.	Aneka Industri lainnya	22	22	100	3-5
5.	Industri Dasar	27	27	100	2-9
6.	Kimia	10	10	100	3-6
7.	Logam	15	15	100	2-5
8.	Pertambangan	22	22	100	2-10
9.	Agribisnis	26	26	100	2-8
	TOTAL	177			



Dari tabel dan grafik di atas diketahui bahwa 422 Emiten/Perusahaan Publik yang ditelaah laporan tahunannya (100%) telah menginformasikan keberadaan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan. Jumlah anggota komisaris Emiten dan Perusahaan Publik berkisar antara dua sampai dengan 22 (dua puluh dua) orang. Dibandingkan tahun 2008, jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang menginformasikan keberadaan Komisaris dalam laporan tahunan adalah tetap sama yaitu 100%. Sedangkan jumlah kisaran anggota komisaris Emiten dan Perusahaan Publik meningkat yaitu dari antara 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) orang menjadi 2 sampai dengan 22 orang. Namun demikian hanya satu Emiten yaitu PT Metropolitan Kentjana Tbk yang mempunyai jumlah Komisaris mencapai 22 orang.

2. Komisaris yang merupakan Pihak Terafiliasi dengan Emiten/Perusahaan Publik

Tabel 3.5. Jumlah Komisaris Terafiliasi pada Emiten/PP

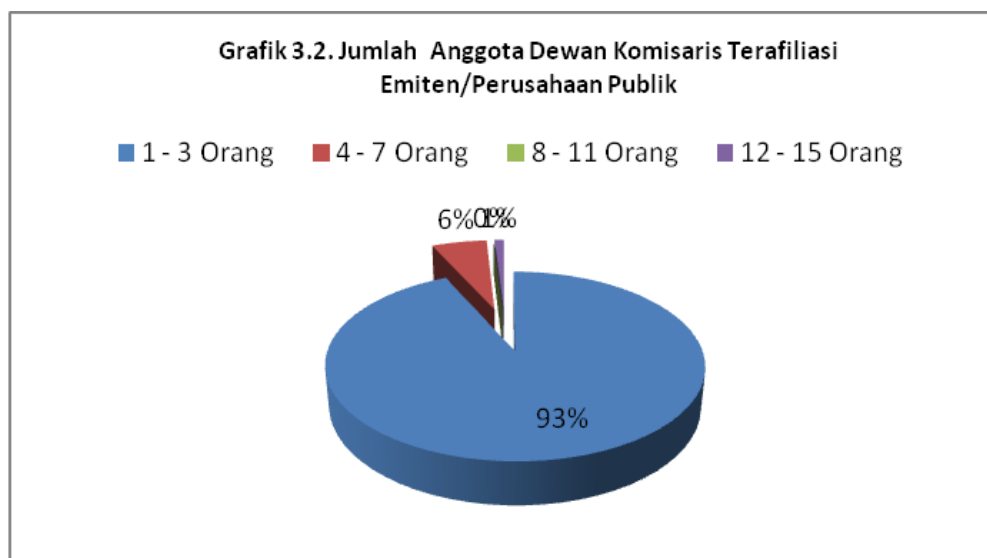
No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan jumlah anggota Dewan Komisaris	(%)	Jml Dekom
1.	Sektor Jasa	245	81	33,06	1-15
2.	Sektor Riil	177	22	12,43	1-6
	TOTAL	422	103	24,41	

Tabel 3.6. Jumlah Anggota Dewan Komisaris Terafiliasi pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Dekom
1.	Perbankan	33	4	12,12	1-2
2.	Asuransi	11	1	9,09	2
3.	Sekuritas dan Investasi	26	5	19,23	1-3
4.	Pembiayaan	22	6	26,09	1-2
5.	Perdagangan	35	4	11,43	1-2
6.	Media dan teknologi Informasi	16	10	62,50	1-3
7.	Properti dan real Estate	46	17	36,95	1-15
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	4	36,36	1-7
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	15	75,00	1-5
10.	Perhubungan/transportasi	18	10	55,55	1-3
11.	Telekomunikasi	7	5	71,43	1-5
	TOTAL	245			

Tabel 3.7. Jumlah Anggota Dewan Komisaris Terafiliasi pada Emiten/PP Sektor Riil

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Dekom
1.	Tekstil & Garment	20	3	15	2-9
2.	Alas Kaki	3	0	0	0
3.	Barang Konsumsi	32	4	12,50	1-3
4.	Aneka Industri lainnya	22	3	13,64	1-4
5.	Industri Dasar	27	3	11,11	2-6
6.	Kimia	10	0	0	0
7.	Logam	15	5	33,33	1-2
8.	Pertambangan	22	2	9,09	1-2
9.	Agribisnis	26	2	7,69	1-2
	TOTAL	177			



Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari 422 perusahaan, yang menyajikan informasi tentang Komisaris yang merupakan pihak terafiliasi dengan Emiten dan Perusahaan Publik hanya 103 (24,41%) perusahaan terdiri dari 81 (33,06%) perusahaan sektor jasa dan 22 (12,43%) perusahaan sektor riil. Jumlah anggota Komisaris yang merupakan pihak terafiliasi dengan Emiten dan Perusahaan Publik berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) orang. Sebagian besar yaitu sebanyak 319 (75,59%) perusahaan tidak menyajikan informasi tentang komisaris yang terafiliasi dengan Emiten dan Perusahaan Publik. Pada tahun 2008, prosentase jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang menginformasikan keberadaan Komisaris yang terafiliasi dalam laporan tahunan adalah sebesar 81 (19,24%). Dengan demikian penyampaian informasi keberadaan Komisaris yang terafiliasi dalam laporan tahunan 2009 mengalami peningkatan sebesar 5,17%. Mayoritas Emiten dan Perusahaan Publik (93%) mempunyai komisaris terafiliasi antara satu sampai dengan 2 (dua) orang.

3. Komisaris Independen

Tabel.3.8. Jumlah Komisaris Independen pada Emiten/PP

No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan jumlah anggota Dewan Komisaris	(%)	Jml Dekom
1.	Sektor Jasa	245	239	97,55	1-7
2.	Sektor Riil	177	155	87,57	1-5
	TOTAL	422	394	93,36	

Tabel 3.9. Jumlah Anggota Komisaris Independen pada Emiten/PP Sektor Jasa

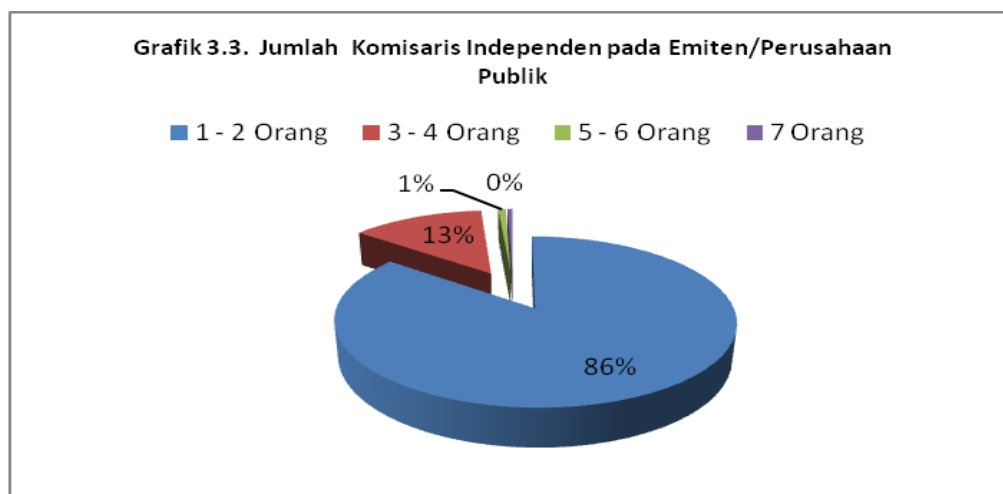
No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Dekom
1.	Perbankan	33	32	96,97	1-4
2.	Asuransi	11	11	100	1-2
3.	Sekuritas dan Investasi	26	24	92,31	1-3
4.	Pembiayaan	22	22	100	1-2
5.	Perdagangan	35	33	94,29	1-4
6.	Media dan teknologi Informasi	16	16	100	1-7
7.	Properti dan real Estate	46	46	100	1-6
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	10	90,91	1-2
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	20	100	1-3
10.	Perhubungan/transportasi	18	18	100	1-3
11.	Telekomunikasi	7	7	100	1-3
	TOTAL	245			

Tabel 3.10. Jumlah Anggota Komisaris Independen pada Emiten/PP Sektor Riil

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Dekom
1.	Tekstil & Garment	20	18	90	1-4
2.	Alas Kaki	3	3	100	1-2
3.	Barang Konsumsi	32	29	90,62	1-3
4.	Aneka Industri lainnya	22	21	95,45	1-5
5.	Industri Dasar	27	24	88,89	1-4
6.	Kimia	10	10	100	1-2
7.	Logam	15	11	73,33	1-2
8.	Pertambangan	22	18	86,36	1-3
9.	Agribisnis	26	20	76,93	1-3
	TOTAL	177			

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari 422 Emiten dan Perusahaan Publik, 394 Perusahaan (93,36%) telah mengungkapkan informasi tentang jumlah Komisaris Independen, terdiri dari 239 (97,55%) perusahaan Sektor Jasa, dan 155 (87,57%) Perusahaan Sektor Riil. Sedangkan sebanyak 28 (6,63%) perusahaan tidak mengungkapkan namun belum dapat dipastikan bahwa perusahaan tidak memiliki Komisaris Independen. Komisaris independen yang dimiliki oleh Emiten dan Perusahaan Publik berjumlah antara satu sampai dengan 7 (tujuh) orang.

Dibandingkan tahun 2008, jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang menginformasikan keberadaan Komisaris Independen dalam laporan tahunan mengalami penurunan sebesar 0,7%, dimana pada tahun 2008 perusahaan yang mengungkapkan sebanyak 396 Perusahaan (94,06%) terdiri dari 230 (95,44%) dari sektor jasa dan sebanyak 166 (92,22%) dari sektor riil. Sedangkan jumlah anggota komisaris Emiten dan Perusahaan Publik berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) orang. Sebagian besar Emiten dan Perusahaan Publik (86%) mempunyai komisaris perusahaan berkisar antara satu sampai dengan 2 (dua) orang.



4. Jumlah Rapat Dewan Komisaris Dalam 1 Tahun

Tabel 3.11. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam 1 tahun pada Emiten/PP

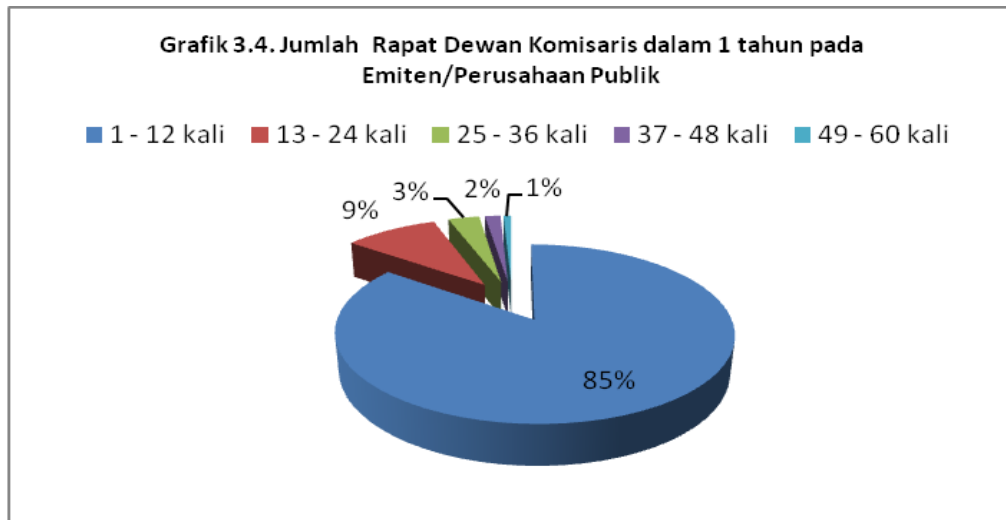
No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan jumlah Rapat Dewan Komisaris	(%)	Jmlh Kehadiran
1.	Sektor Jasa	245	152	62,04	1-60
2.	Sektor Riil	177	105	59,32	1-38
	TOTAL	422	257	60,9	

Tabel 3.12. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Kehadiran
1.	Perbankan	33	31	93,94	3-51
2.	Asuransi	11	8	72,73	2-12
3.	Sekuritas dan Investasi	26	17	65,38	1-35
4.	Pembiayaan	22	15	68,18	3-16
5.	Perdagangan	35	17	48,57	2-17
6.	Media dan teknologi Informasi	16	8	50	1-12
7.	Properti dan real Estate	46	22	47,83	2-60
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	4	36,36	1-12
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	13	65	4-36
10.	Perhubungan/transportasi	18	10	55,55	1-18
11.	Telekomunikasi	7	5	71,43	1-14
	TOTAL	245			

Tabel 3.13. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Riil

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Kehadiran
1.	Tekstil & Garment	20	10	50	1-38
2.	Alas Kaki	3	2	66,67	1-2
3.	Barang Konsumsi	32	21	71,88	1-14
4.	Aneka Industri lainnya	22	17	77,27	2-24
5.	Industri Dasar	27	15	55,56	1-24
6.	Kimia	10	8	80	2-9
7.	Logam	15	6	40	2-12
8.	Pertambangan	22	14	63,64	2-27
9.	Agribisnis	26	11	42,31	1-11
	TOTAL	177			



Berdasarkan tabel 3.13 dan grafik 3.4 di atas, Emiten dan Perusahaan Publik yang menyajikan informasi tentang jumlah rapat Dewan Komisaris hanya ada 257 perusahaan (60,9%) dari total 422 perusahaan. Dengan demikian, sebanyak 165 perusahaan (39,10%) tidak mengungkapkan informasi tentang jumlah rapat Dewan Komisaris tersebut. Sementara itu, jumlah rapat Dewan Komisaris berkisar antara 1 sampai dengan 60 kali dalam satu tahun.

Dari 245 Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa, hanya 152 perusahaan (62,04%) yang menyajikan informasi tersebut dengan jumlah rapat antara antara 1(satu) sampai dengan 60 (enam puluh) kali dalam setahun. Sementara itu, dari 177 perusahaan sektor riil, sebanyak 105 perusahaan (59,32%) menyajikan informasi tersebut dengan jumlah rapat antara antara 1 sampai dengan 38 kali dalam setahun.

Pengungkapan jumlah rapat Dewan Komisaris untuk sektor jasa, paling banyak dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik di industri perbankan yaitu dilakukan oleh 31 perusahaan dari 33 perusahaan (93,94%). Sementara untuk sektor riil, pengungkapan terbanyak dilakukan oleh Emiten/Perusahaan Publik pada industri kimia dengan jumlah 8 perusahaan dari 10 perusahaan (80 %).

Pengungkapan informasi tentang jumlah rapat Dewan Komisaris dalam laporan tahunan 2008 adalah sebanyak 244 Perusahaan (57,96%), terdiri dari 140 (58,09%) dari sektor jasa dan sebanyak 104 (57,78%) dari sektor riil. Jumlah rapat Dewan Komisaris berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 61 (enam puluh satu) kali dalam setahun. Dengan demikian terdapat peningkatan sebesar 2,94%. Rata-rata perusahaan (85%) mengadakan rapat dewan komisaris sebanyak satu sampai dengan 12 (dua belas) kali dalam satu tahun.

5. Jumlah Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Dewan Komisaris

Tabel.3.14. Jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris selama 1 tahun

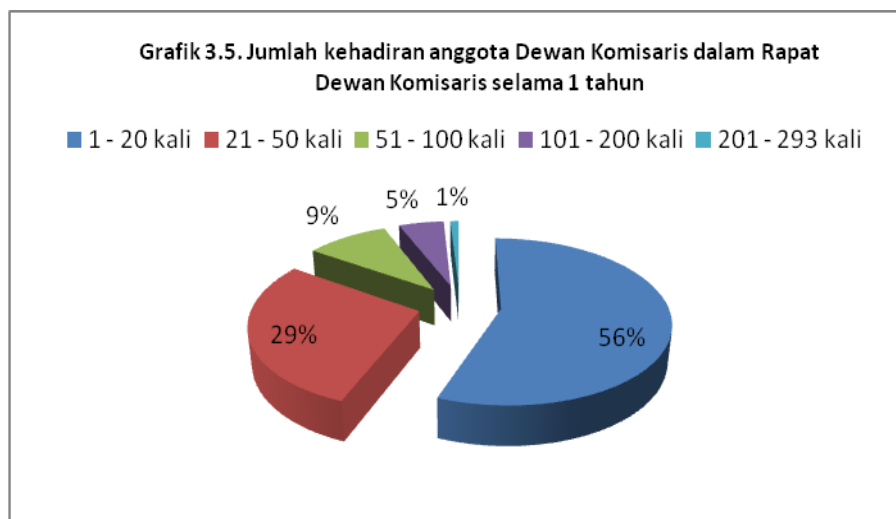
No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan	(%)	Jmlh Kehadiran dlm Rapat
1.	Sektor Jasa	245	130	53,28	2-293
2.	Sektor Riil	177	83	46,89	1-126
	TOTAL	422	213	50,47	

Tabel 3.15. Jumlah kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris selama 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Kehadiran
1.	Perbankan	33	29	87,88	5-293
2.	Asuransi	11	8	72,73	5-36
3.	Sekuritas dan Investasi	26	13	50	3-120
4.	Pembiayaan	22	12	54,55	8-60
5.	Perdagangan	35	14	40	4-69
6.	Media dan teknologi Informasi	16	8	50	2-44
7.	Properti dan real Estate	46	20	43,48	4-252
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	3	27,27	2-29
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	8	40	16-92
10.	Perhubungan/transportasi	18	10	55,55	3-84
11.	Telekomunikasi	7	5	71,43	3-65
	TOTAL	245			

Tabel 3.16. Jumlah kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris selama 1 tahun pada Emiten/Perusahaan Publik Sektor Riil

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Kehadiran
1.	Tekstil & Garment	20	6	30	1-43
2.	Alas Kaki	3	9	33,33	8
3.	Barang Konsumsi	32	19	59,38	1-47
4.	Aneka Industri lainnya	22	14	63,64	8-60
5.	Industri Dasar	27	9	33,33	5-60
6.	Kimia	10	7	70	9-27
7.	Logam	15	4	26,67	4-12
8.	Pertambangan	22	13	59,09	4-126
9.	Agribisnis	26	10	38,46	5-50
	TOTAL	177			



Dari tabel 3.16. di atas terlihat bahwa Emiten dan Perusahaan Publik yang menyajikan informasi tentang jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris sebanyak 213 perusahaan (50,47%) dari 422 Emiten /Perusahaan Publik dengan frekuensi kehadiran antara 1 sampai dengan 293 kali dalam setahun. Sementara itu, sebanyak 209 perusahaan (49,53%) tidak menyajikan informasi dimaksud pada laporan tahunan 2009.

Sementara itu, dari 245 Emiten/Perusahaan Publik pada sektor jasa, terdapat 130 (53,28%) yang menyajikan informasi tersebut dengan frekuensi kehadiran antara 2 sampai dengan 293 kali dalam setahun. Untuk perusahaan sektor riil, dari 177 Emiten /Perusahaan Publik, terdapat 83 Perusahaan (46,89%) yang menyajikan informasi dengan frekuensi kehadiran antara 1 sampai dengan 126 kali dalam setahun.

Berdasarkan table 3.15, industri perbankan menempati urutan paling tinggi dalam penyajian informasi jumlah kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat dengan jumlah 29 dari 33 perusahaan (87,88%) dengan jumlah frekuensi kehadiran antara 5 sampai dengan 293 dalam setahun. Untuk sektor riil, jumlah Emiten atau Perusahaan Publik di industri kimia paling banyak menyajikan informasi tentang frekuensi kehadiran Dewan Komisaris yaitu sejumlah 7 perusahaan dari 10 Emiten/Perusahaan Publik (70%).

Berdasarkan laporan tahunan 2008, jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang menginformasikan jumlah kehadiran Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris adalah sebanyak 199 perusahaan (47,27), terdiri dari 115 perusahaan (47,27%) dari sektor jasa dan sebanyak 84 (46,67%) Emiten/ Perusahaan Publik dari sektor riil. Sedangkan jumlah kehadiran Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 302 (tiga ratus dua) kali dalam setahun. Dengan demikian, dalam laporan tahunan 2009 terdapat peningkatan sebesar 3,20% jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang menginformasikan jumlah kehadiran Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, dibandingkan laporan tahunan 2008.

6. Jumlah Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi

Tabel.3.17. Jumlah Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi selama 1 tahun

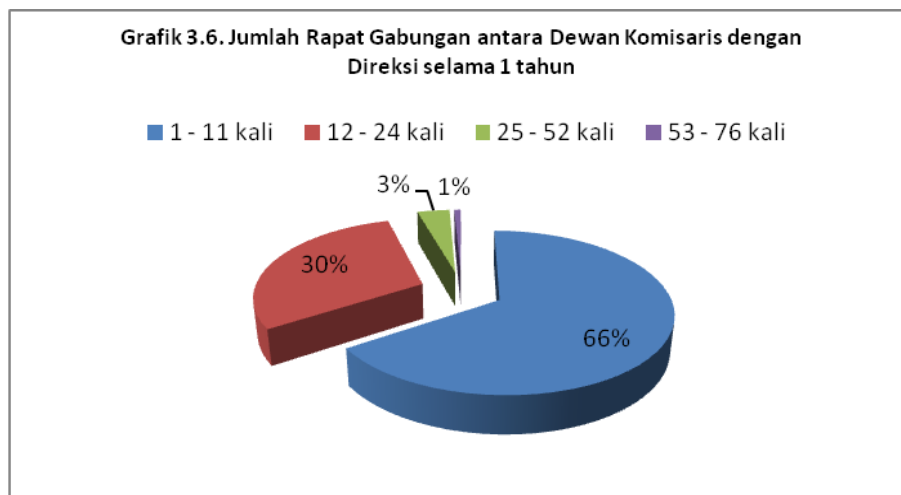
No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan	(%)	Jmlh Kehadiran dlm Rapat
1.	Sektor Jasa	245	79	32,24	1-76
2.	Sektor Riil	177	58	32,77	1-46
	TOTAL	422	137	32,46	

Tabel 3.18. Jumlah Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi selama1 tahun pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jmlh Kehadiran dlm Rapat
1.	Perbankan	33	20	60,61	60-61
2.	Asuransi	11	2	18,18	18,18
3.	Sekuritas dan Investasi	26	10	38,46	38,46
4.	Pembiayaan	22	7	31,82	31,82
5.	Perdagangan	35	5	14,29	14,29
6.	Media dan teknologi Informasi	16	7	43,75	2-10
7.	Properti dan real Estate	46	11	23,91	3-16
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	4	36,36	2-43
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	5	25	2-36
10.	Perhubungan/transportasi	18	6	33,33	2-15
11.	Telekomunikasi	7	2	28,57	2-16
	TOTAL	245			

Tabel 3.19. Jumlah Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi selama1 tahun pada Emiten/PP Sektor Riil

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jmlh Kehadiran dlm Rapat
1.	Tekstil & Garment	20	4	20	4-16
2.	Alas Kaki	3	2	66,67	?
3.	Barang Konsumsi	32	11	34,38	4-46
4.	Aneka Industri lainnya	22	7	31,82	3-12
5.	Industri Dasar	27	3	11,11	2-6
6.	Kimia	10	3	30	7-12
7.	Logam	15	3	20	3-8
8.	Pertambangan	22	10	45,45	2-21
9.	Agribisnis	26	8	30,77	4-24
	TOTAL	177			



Berdasarkan tabel di atas, Emiten dan Perusahaan Publik yang menyajikan informasi tentang jumlah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2009 hanya 137 perusahaan dari 422 total perusahaan (32,46%), dengan kata lain 285 Perusahaan atau (67,54%) tidak menyajikan informasi tersebut. Jumlah ini menurun 1,98% dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu 145 perusahaan (34,44%) dari total 421 perusahaan yang mengungkapkan laporan tersebut. Jumlah rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi antara 1 sampai 76 kali dalam setahun. Dimana sebanyak 79 perusahaan (32,24%) dari Sektor Jasa dengan jumlah rapat gabungan 1 sampai 76 kali dalam setahun dan sebanyak 53 perusahaan (29,78%) dari Sektor Riil dengan jumlah rapat gabungan antara 2 sampai 46 kali dalam setahun. Hal ini mengalami perbaikan jika dibandingkan tahun 2008, dimana pada tahun 2008 dari 145 (34,44%) Perusahaan tersebut sebanyak 94 perusahaan (39%) dari Sektor Jasa. Jumlah rapat gabungan pada Sektor Jasa antara 1 sampai 72 kali dalam setahun. Sementara sebanyak 51 perusahaan (28,33%) merupakan perusahaan dari Sektor Riil dengan jumlah rapat gabungan antara 1 sampai 33 kali dalam setahun.

Pengungkapan informasi tersebut paling banyak dilakukan oleh perusahaan di industri perbankan yaitu sebanyak 20 perusahaan (60,61%) dari 33 perusahaan untuk sektor jasa dengan jumlah rapat antara 1 sampai dengan 76 kali dalam setahun. Sedangkan untuk sektor riil, perusahaan di Industri Media dan Teknologi yang mengungkapkan jumlah rapat gabungan tertinggi yaitu sebanyak 7 dari 16 perusahaan (43,7%) dengan jumlah rapat antara 2 sampai 10 kali rapat dalam setahun.

7. Jumlah Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi

Tabel.3.20. Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan selama 1 tahun

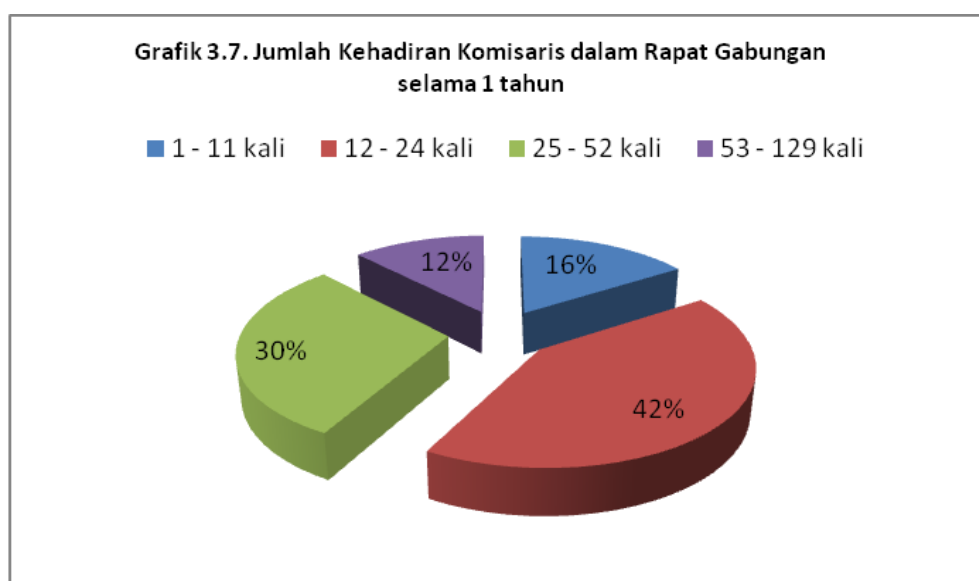
No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan	(%)	Jmlh Kehadiran
1.	Sektor Jasa	245	68	27,76	3-129
2.	Sektor Riil	177	39	22,03	2-126
	TOTAL	422	107		

Tabel 3.21. Jumlah Kehadiran Komisaris dalam Rapat Gabungan selama 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jmlh Kehadiran
1.	Perbankan	33	18	54,55	3-129
2.	Asuransi	11	1	9,09	15
3.	Sekuritas dan Investasi	26	8	30,77	4-63
4.	Pembiayaan	22	6	27,27	8-71
5.	Perdagangan	35	4	11,43	15-31
6.	Media dan teknologi Informasi	16	7	43,75	6-50
7.	Properti dan real Estate	46	10	21,74	8-73
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	3	27,27	8-53
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	4	20	12-61
10.	Perhubungan/transportasi	18	5	27,77	12-66
11.	Telekomunikasi	7	2	28,57	8-78
	TOTAL	245			

Tabel 3.22. Jumlah Kehadiran Komisaris dalam Rapat Gabungan selama 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Riil

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Dekom
1.	Tekstil & Garment	20	3	15	12-126
2.	Alas Kaki	3	0	0	0
3.	Barang Konsumsi	32	6	18,74	6-57
4.	Aneka Industri lainnya	22	4	18,18	12-73
5.	Industri Dasar	27	23	85,19	1-4
6.	Kimia	10	2	20	2-17
7.	Logam	15	2	13,33	9-24
8.	Pertambangan	22	8	36,36	8-118
9.	Agribisnis	26	5	19,23	12-50
	TOTAL	177			



Berdasarkan tabel di atas, Emiten dan Perusahaan Publik yang menyajikan informasi tentang jumlah kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi hanya 107 perusahaan (25,36%) dari 422 perusahaan. Jumlah ini menurun sekitar 3,15% dibandingkan dengan tahun 2008 yang berjumlah 120 perusahaan (28,50%) dari 421 perusahaan yang mengungkapkan informasi tersebut. Jumlah kehadiran anggota dewan komisaris sepanjang tahun 2009 antara 2 sampai 129 kali.

Pengungkapan informasi tersebut dilakukan oleh 68 perusahaan (27,76%) dari Sektor Jasa dengan jumlah kehadiran antara 3 sampai 129 dan 39 perusahaan (22,03%) dari sektor Riil dengan jumlah kehadiran antara 2 sampai 126 kehadiran. Jika dibandingkan dengan tahun 2008, pengungkapan informasi ini menurun mengingat pada tahun 2008 dari 120 (28,50%) Perusahaan tersebut sebanyak 79 perusahaan (32,78%) dari Sektor Jasa dan 41 perusahaan (23,20%) dari Sektor Riil telah mengungkapkan hal tersebut.

Apabila dilihat berdasarkan jenis Industri dari masing-masing sektor, untuk Sektor Jasa, pengungkapan paling banyak dilakukan oleh perusahaan dalam Industri Perbankan yaitu 17 perusahaan (53,13%) dari 32 perusahaan. Sedangkan untuk sektor Riil, Industri Media dan Teknologi merupakan Jenis Industri dengan jumlah perusahaan yang mengungkapkan jumlah rapat gabungan tertinggi yaitu 6 perusahaan (37,5%) dari 16 perusahaan. Pengungkapan informasi di hampir semua industri pada sektor Riil mempunyai prosentase pengungkapan yang cukup rendah yaitu dibawah 50%.

8. Jumlah Anggota Komite Audit

Tabel.3.23. Jumlah Anggota Komite Audit pada Emiten/PP

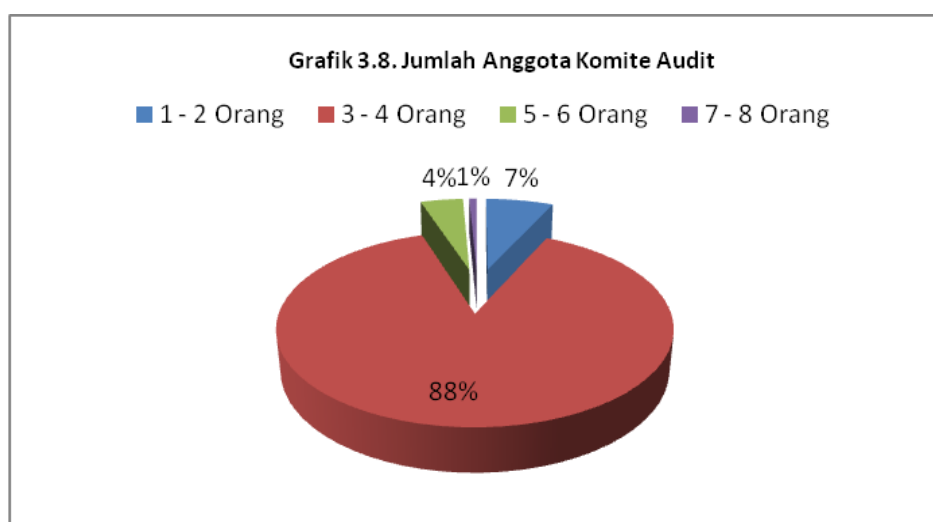
No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan	(%)	Jmlh Anggota
1.	Sektor Jasa	245	230	93,88	1-7
2.	Sektor Riil	177	165	93,22	1-8
	TOTAL	422	395	93,60	

Tabel 3.24. Jumlah Anggota Komite Audit pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jmlh Anggota
1.	Perbankan	33	33	100	3-7
2.	Asuransi	11	11	100	2-5
3.	Sekuritas dan Investasi	26	26	100	1-4
4.	Pembiayaan	22	21	95,45	1-6
5.	Perdagangan	35	33	94,29	1-7
6.	Media dan teknologi Informasi	16	13	81,25	2-5
7.	Properti dan real Estate	46	43	93,48	2-5
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	7	63,64	3-5
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	19	95	2-5
10.	Perhubungan/transportasi	18	18	100	2-4
11.	Telekomunikasi	7	6	85,71	3-6
	TOTAL	245			

Tabel 3.25. Jumlah Anggota Komite Audit pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Anggota
1.	Tekstil & Garment	20	17	84	2-4
2.	Alas Kaki	3	3	100	3
3.	Barang Konsumsi	32	30	93,75	1-5
4.	Aneka Industri lainnya	22	22	100	2-4
5.	Industri Dasar	27	25	92,59	1-4
6.	Kimia	10	9	90	3-4
7.	Logam	15	14	93,33	1-4
8.	Pertambangan	22	20	90,9	3-8
9.	Agribisnis	26	25	95,15	3-5
	TOTAL	177			



Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa sebanyak 395 Emiten dan Perusahaan Publik atau 93,60% telah menginformasikan tentang jumlah anggota Komite Audit. Jumlah anggota Komite Audit antara 1 sampai 8 orang. Sebanyak 27 (6,39%) Emiten dan Perusahaan Publik tidak mengungkapkan informasi tentang Komite Audit, namun belum dapat dipastikan apakah perusahaan tidak memiliki komite audit atau hanya lalai menyajikannya dalam Laporan tahunan, mengingat keberadaan komite audit telah diwajibkan dalam peraturan Bapepam-LK. Salah satu alasan tidak dibentuknya Komite Audit karena proses bisnis dan organisasi perusahaan masih sederhana, sehingga pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Komite Audit dilaksanakan oleh Dewan Komisaris melalui pertemuan rutin dan kunjungan berkala ke perusahaan.

Dari 395 Emiten dan Perusahaan Publik yang menginformasikan tentang Komite Audit, sebanyak 230 perusahaan (93,88%) berasal dari Sektor Jasa, dengan jumlah anggota komite audit antara 1 sd 7 orang dan sebanyak 165 (93,22%) dari Sektor Riil, dengan jumlah anggota Komite Audit berkisar antara 1 sampai dengan 8 orang.

Dari data tersebut juga diketahui bahwa sebanyak 27 perusahaan hanya memiliki komite audit dengan jumlah anggota 1 sampai 2 orang saja. Hal ini belum memenuhi batasan minimal jumlah anggota Komite Audit sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yaitu 3 orang.

Dibandingkan tahun 2008, dari 421 Emiten/PP, jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang menginformasikan jumlah Komite Audit sebanyak 397 Emiten/Perusahaan Publik atau 94,30% yang terdiri dari 232 (96,27%) dari sektor jasa dan sebanyak 165 (91,67%) Emiten/PP dari sektor riil. Jumlah Anggota Komite Audit berkisar antara 1 sampai dengan 7 orang. Dari data tahun 2008 diketahui juga bahwa terdapat 31 Emiten/PP yang memiliki komite audit dengan jumlah anggota 1 sampai 2 orang saja.

Secara persentase, penyajian informasi tentang komite audit dalam laporan tahunan 2009 mengalami sedikit penurunan yaitu 0,7% sedangkan untuk jumlah anggota komite audit mengalami peningkatan yaitu antara 1 – 8 orang. Mayoritas perusahaan (88%) mempunyai jumlah anggota komite audit berkisar antara 3 – 4 orang.

9. Jumlah Anggota Komite Audit Yang Merupakan Komisaris Independen

Tabel 3.26. Jumlah Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen

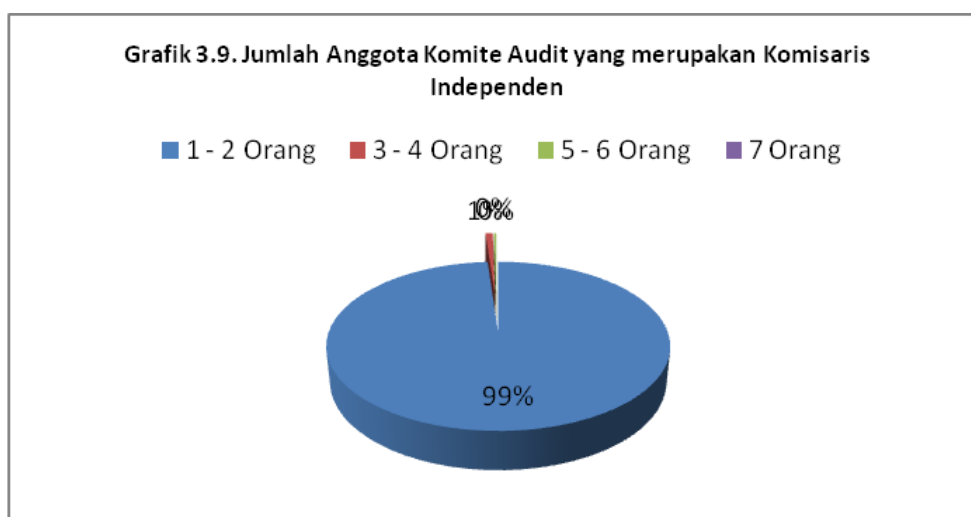
No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan	(%)	Jmlh Komisaris
1.	Sektor Jasa	245	209	85,31	1-4
2.	Sektor Riil	177	144	81,36	1-7
	TOTAL	422	353	83,65	

Tabel 3.27. Jumlah Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jmlh Komisaris
1.	Perbankan	33	30	90,91	1-4
2.	Asuransi	11	11	100	1-2
3.	Sekuritas dan Investasi	26	22	84,62	1-3
4.	Pembiayaan	22	15	68,18	1-2
5.	Perdagangan	35	31	88,57	1-2
6.	Media dan teknologi Informasi	16	11	68,75	1-2
7.	Properti dan real Estate	46	41	89,13	1-2
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	7	63,64	1
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	17	85	1
10.	Perhubungan/transportasi	18	8	100	1-2
11.	Telekomunikasi	7	46	85,71	1-3
	TOTAL	245			

Tabel 3.28. Jumlah Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten/PP Sektor Riil

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Komisaris
1.	Tekstil & Garment	20	15	75	1
2.	Alas Kaki	3	2	66,7	1
3.	Barang Konsumsi	32	29	90,62	1
4.	Aneka Industri lainnya	22	17	72,27	1-2
5.	Industri Dasar	27	21	77,78	1-2
6.	Kimia	10	9	90	1-2
7.	Logam	15	10	66,67	1
8.	Pertambangan	22	20	90,90	1-5
9.	Agribisnis	26	21	80,76	1-2
	TOTAL	177			



Dari tabel di atas terlihat bahwa 353 perusahaan (83,65%) dari 422 Emiten dan Perusahaan Publik mengungkapkan informasi tentang anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen dengan jumlah antara 1 sampai dengan 7 orang. Sebaliknya 69 Perusahaan (16,35%) tidak mengungkapkan informasi tersebut.

Dari 353 Perusahaan tersebut sebanyak 209 Emiten/Perusahaan Publik (85,31%) dari Sektor Jasa, dengan jumlah anggota berkisar antara 1 sampai dengan 4 orang. Sedangkan dari Sektor Riil sebanyak 144 perusahaan (81,36%) dengan jumlah anggota berkisar antara 1 sampai dengan 4 orang.

Dibandingkan laporan tahunan 2008, penyajian jumlah Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen dalam laporan tahunan 2009 mengalami peningkatan sebesar 2,65% mengingat pada tahun 2008, dari 421 Emiten/Perusahaan Publik yang

menginformasikan jumlah Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen berjumlah 341 perusahaan (81%) terdiri dari 197 perusahaan (81,74%) dari sektor jasa dan 144 (80%) Emiten/PP dari sektor riil. Sedangkan jumlah Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen berkisar antara 1 sampai dengan 5 orang.

Jumlah komisaris independen yang menjadi anggota komite audit hampir seluruhnya (99%) berkisar antara 1 sampai dengan 2 (dua) orang.

10. Jumlah Rapat Anggota Komite Audit Dalam 1 Tahun

Tabel 3.29. Jumlah Rapat Komite Audit dalam 1 tahun pada Emiten/PP

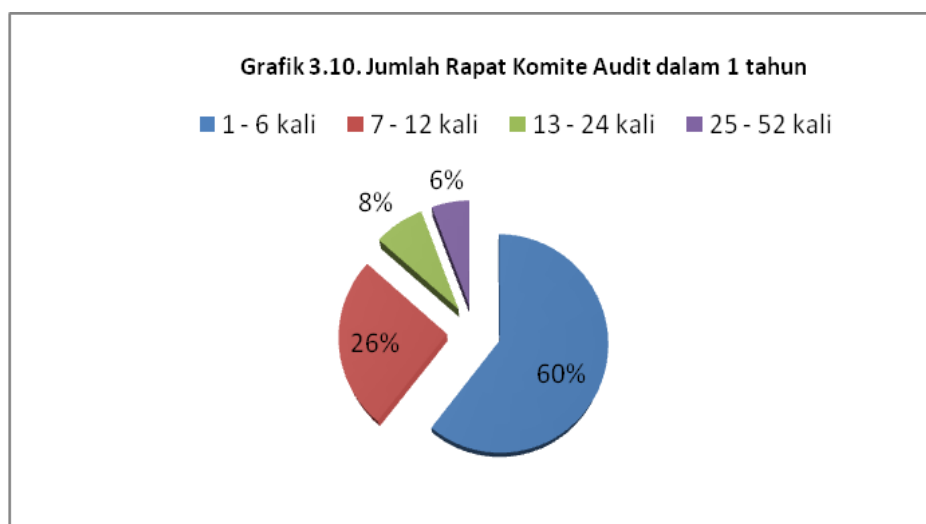
No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan	(%)	Jmlh Rapat
1.	Sektor Jasa	245	120	48,82	2-52
2.	Sektor Riil	177	86	48,59	1-43
	TOTAL	422	206	48,82	

Tabel 3.30. Jumlah Rapat Komite Audit dalam 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Rapat
1.	Perbankan	33	23	69,70	3-33
2.	Asuransi	11	5	45,45	4-20
3.	Sekuritas dan Investasi	26	8	30,77	4-12
4.	Pembiayaan	22	13	59,09	3-12
5.	Perdagangan	35	16	45,71	2-39
6.	Media dan teknologi Informasi	16	10	62,50	2-12
7.	Properti dan real Estate	46	24	52,17	2-30
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	3	27,27	7-34
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	7	35	4-52
10.	Perhubungan/transportasi	18	7	38,89	2-8
11.	Telekomunikasi	7	4	57,14	4-34
	TOTAL	245			

Tabel 3.31. Jumlah Rapat Komite Audit dalam 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Komisaris
1.	Tekstil & Garment	20	10	50	4-12
2.	Alas Kaki	3	2	66,7	4-12
3.	Barang Konsumsi	32	14	43,75	1-34
4.	Aneka Industri lainnya	22	12	54,54	2-43
5.	Industri Dasar	27	17	17	1-32
6.	Kimia	10	8	80	4-12
7.	Logam	15	5	33,33	2-12
8.	Pertambangan	22	9	40,90	3-29
9.	Agribisnis	26	9	34,6	3-12
	TOTAL	177			



Dari tabel di atas, hanya 206 Emiten/Perusahaan Publik (48,82%) dari 422 Emiten Perusahaan Publik yang menyajikan informasi tentang jumlah rapat Komite Audit meskipun hal ini telah dipersyaratkan dalam peraturan Bapepam-LK. Jumlah rapat komite Audit dalam 1 tahun berkisar antara 1 sampai dengan 52 kali.

Dari jumlah tersebut, 120 Emiten/Perusahaan Publik (48,82%) merupakan perusahaan dari Sektor Jasa, dengan jumlah rapat berkisar antara 2 sampai dengan 52 kali sedangkan dari Sektor Riil sebanyak 86 perusahaan (48,59%) dengan jumlah rapat dalam setahun antara 1 sampai dengan 47 kali.

Dibandingkan dengan tahun 2008, jumlah perusahaan yang menyajikan jumlah rapat Komite Audit dalam laporan tahunan 2009 menurun sebesar 4,63%. Dari 421 Emiten/Perusahaan Publik, sebanyak 225 perusahaan (53,44%) telah mengungkapkan terdiri dari 131 perusahaan (54,36%) dari sektor jasa dan 94 perusahaan (52,22%) sektor riil. Jumlah rapat Anggota Komite Audit berkisar antara 1 sampai dengan 51 kali dalam 1 tahun.

11. Jumlah Kehadiran Anggota Komite Audit Dalam Rapat Selama 1 Tahun

Tabel 3.32. Jumlah Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat selama 1 tahun pada Emiten/Perusahaan Publik

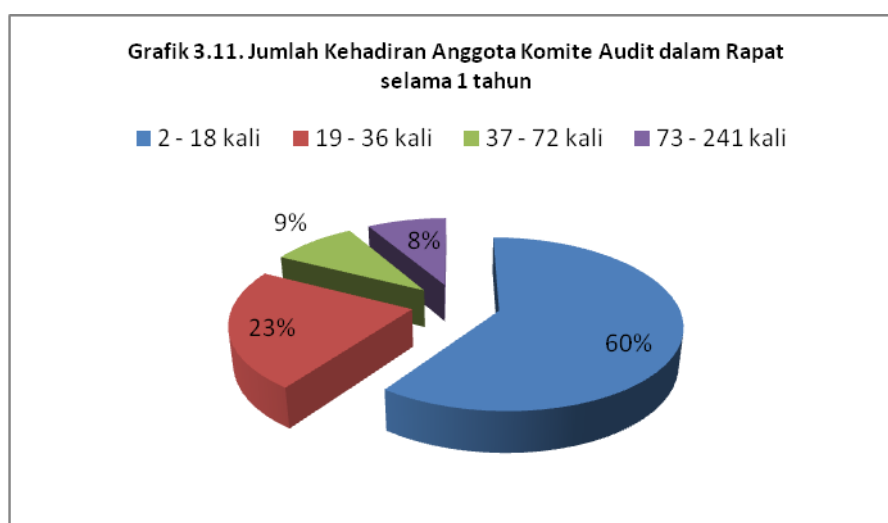
No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan	(%)	Jml Kehadiran
1.	Sektor Jasa	245	103	42,04	2-241
2.	Sektor Riil	177	74	41,8	3-100
	TOTAL	422	177	41,94	

Tabel 3.33. Jumlah Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat selama 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Kehadiran
1.	Perbankan	33	22	66,67	6-158
2.	Asuransi	11	5	45,45	12-54
3.	Sekuritas dan Investasi	26	5	19,23	11-36
4.	Pembiayaan	22	11	50	9-36
5.	Perdagangan	35	15	42,86	2-241
6.	Media dan teknologi Informasi	16	8	50	5-42
7.	Properti dan real Estate	46	19	41,30	4-39
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	3	27,27	27-157
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	5	25	12-156
10.	Perhubungan/transportasi	18	6	33,33	2-12
11.	Telekomunikasi	7	4	57,14	9-98
	TOTAL	245			

Tabel 3.34. Jumlah Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat selama 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Kehadiran
1.	Tekstil & Garment	20	6	30	8-19
2.	Alas Kaki	3	2	66,7	12-36
3.	Barang Konsumsi	32	10	31,25	3-60
4.	Aneka Industri lainnya	22	11	50	8-86
5.	Industri Dasar	27	16	59,25	3-83
6.	Kimia	10	7	70	12-36
7.	Logam	15	5	33,33	6-36
8.	Pertambangan	22	8	36,36	9-100
9.	Agribisnis	26	9	34,6	3-36
	TOTAL	177			



Dari tabel di atas, informasi tentang jumlah kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat Komite Audit hanya diungkapkan oleh 177 perusahaan (41,94%) dari 422 Emiten dan Perusahaan dengan jumlah frekuensi kehadiran antara 3 sampai dengan 241 kali dalam

setahun. Dari jumlah tersebut, 103 Emiten/Perusahaan Publik (42,04%) dari Sektor Jasa, dengan jumlah frekuensi kehadiran antara 2 sampai dengan 241 kali sedangkan 74 perusahaan (41,80%) dari Sektor Riil dengan jumlah frekuensi kehadiran sebanyak 3 sampai dengan 100 kali dalam setahun.

Dibandingkan tahun 2008, pengungkapan informasi jumlah rapat Komite Audit dalam laporan tahunan 2009 mengalami penurunan sebesar 2,28%. Pada tahun 2008, dari 421 Emiten/Perusahaan Publik sebanyak 167 Perusahaan (39,67%) terdiri dari 100 perusahaan (41,49%) dari sektor jasa dan 67 perusahaan (37,22%) dari sektor riil telah mengungkapkan informasi tersebut. Jumlah frekuensi kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat Anggota Komite Audit berkisar antara 3 sampai dengan 176 kali dalam 1 tahun.

12. Jenis Komite Lain

Tabel.3.35. Jumlah Komite Lain yang dibentuk selain Komite Audit

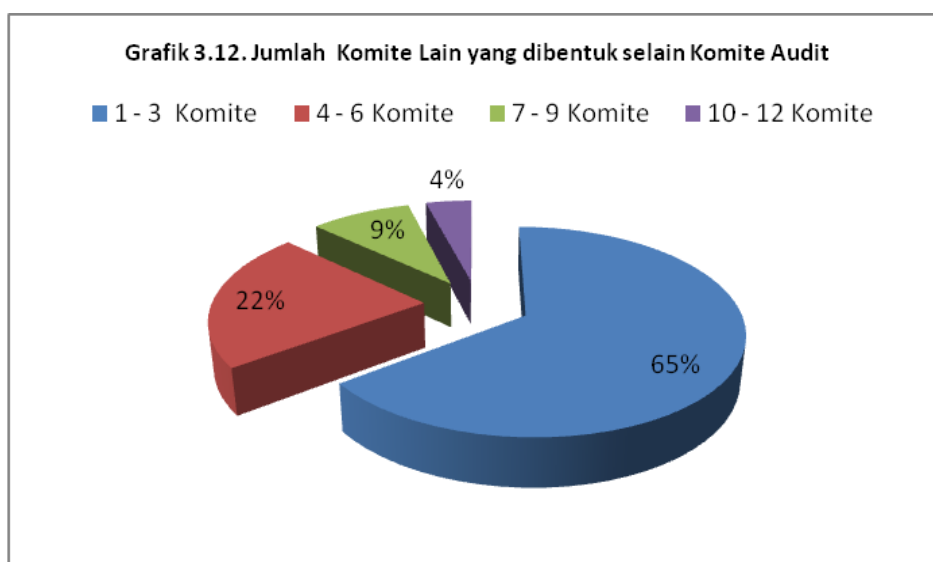
No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan	(%)	Jml Komite Lain
1.	Sektor Jasa	245	91	37,14	1-12
2.	Sektor Riil	177	31	17,51	1-7
	TOTAL	422	122	28,91	

Tabel 3.36. Jumlah Komite Lain yang dibentuk selain Komite Audit pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Komite Lain
1.	Perbankan	33	33	100	2-12
2.	Asuransi	11	1	9,09	1-2
3.	Sekuritas dan Investasi	26	6	23,07	1-6
4.	Pembiayaan	22	9	40,91	1-5
5.	Perdagangan	35	11	31,42	1-7
6.	Media dan teknologi Informasi	16	3	18,75	2
7.	Properti dan real Estate	46	11	23,91	1-5
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	3	27,27	1-4
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	3	15	1-5
10.	Perhubungan/transportasi	18	7	38,89	1-3
11.	Telekomunikasi	7	4	57,14	2-11
	TOTAL	245			

Tabel 3.37. Jumlah Komite Lain yang dibentuk selain Komite Audit pada Emiten/PP Sektor Riil

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Komite Lain
1.	Tekstil & Garment	20	1	5	1
2.	Alas Kaki	3	0	0	0
3.	Barang Konsumsi	32	6	18,75	1-4
4.	Aneka Industri lainnya	22	2	9,91	1-3
5.	Industri Dasar	27	6	22,22	1-4
6.	Kimia	10	1	10	2
7.	Logam	15	3	20	1
8.	Pertambangan	22	8	36,36	1-7
9.	Agribisnis	26	4	15,38	2-3
	TOTAL	177			



Berdasarkan data dalam tabel di atas, sebanyak 122 perusahaan atau 28,91% dari 422 Emiten dan Perusahaan Publik mengungkapkan keberadaan komite selain komite audit dalam perusahaan. Jumlah komite lain tersebut berjumlah antara 1 sampai dengan 12 komite. Dari 122 Emiten/Perusahaan Publik tersebut, sebanyak 91 perusahaan (37,14%) dari Sektor Jasa dengan jumlah komite antara 1 sampai dengan 12 komite dan sebanyak 31 Emiten/Perusahaan Publik (17,51%) dari Sektor Riil, dengan jumlah komite antara 1 sampai dengan 7 komite. Emiten/Perusahaan Publik yang tidak menginformasikan komite lainnya terdiri dari industri media, dan teknologi Informasi dari sektor jasa, dan dari industri barang konsumsi, dan tekstil, garment, dan alas kaki dari sektor riil. Industri perbankan merupakan industri yang mempunyai paling banyak komite selain komite audit yaitu berjumlah antara 1 sampai dengan 12 komite.

Berdasarkan laporan tahunan perusahaan tahun 2008, dari 421 Emiten/PP, jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang menginformasikan jumlah komite lain yang dimiliki Emiten/PP adalah sebanyak 121 Emiten/Perusahaan Publik atau 28,74%, terdiri dari 92

perusahaan (38,17%) dari sektor jasa dan 29 perusahaan (16,11%) Emiten/PP dari sektor riil. Berdasarkan hal tersebut hampir tidak ada perubahan dalam pengungkapan informasi tentang komite lainnya. Namun demikian terdapat peningkatan sebesar 0,17% jika dibandingkan dengan tahun 2008.

Tabel 3.38. Jenis-jenis Komite Lain yang dibentuk selain Komite Audit

No.	Nama Komite Lainnya	Jumlah
1	Komite :Pertimbangan Kasus	1
2	Komite : Operasional	1
3	Komite: Tim Khusus Pelaporan Pelanggaran	1
4	Komite: Tender	1
5	Komite: Tanggung Jawab Sosial	1
6	Komite: Strategi, Mgt Risiko&Investasi	1
7	Komite: Services	1
8	Komite: SDM	22
9	Komite: rencana kerja& anggaran	1
10	Komite: Remuneraai	8
11	Komite: Produk	3
12	Komite: Perencanaan Strategis	1
13	Komite: Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha	1
14	Komite: Pengmbgan Usaha	1
15	Komite: Pengarah teknologi dan Informasi	20
16	Komite: Pengadaan	1
17	Komite: pembelian dan Investasi	1
18	Komite: Pemantau Resiko	35
19	Komite: Pelayanan	1
20	Komite: Oversight	1
21	Komite: Operation Risk	1
22	Komite: nominasi dan remunerasi	72
23	Komite: Nominasi	11
24	Komite: Network	2
25	Komite: MSOP	2
26	Komite: Marketing & Communication	1
27	Komite: market Risk	1
28	Komite: Margin	1
29	Komite: Manajemen Risiko	53
30	Komite: Lelang	1
31	Komite: Kepatuhan	4
32	Komite: Kebijakan Perkreditan	32
33	Komite: Kebijakan pelaporan pelanggaran	1
34	Komite: Investasi	9
35	Komite: Internal Audit	5

36	Komite: Hukum	1
37	Komite: Hemat Energi	1
38	Komite: Hedge Risk Mgt	1
39	Komite: Harga	1
40	Komite: GCG	13
41	Komite: Foreigns Exchange	1
42	Komite: Expansiun Sub Committee	1
43	Komite: Eksekutif	8
44	Komite: Code of Conduct	3
45	Komite: Brand	2
46	Komite: Benturan Kepentingan	1
47	Komite: Asuransi, Risiko Usaha dan Pasca Tambang	1
48	Komite: Anggaran	7
49	Komite ALCO	20
50	Komite ADR Pusat	1
	Total	361

13. Jumlah Anggota Direksi

Tabel.3.39. Jumlah Anggota Direksi Emiten/PP

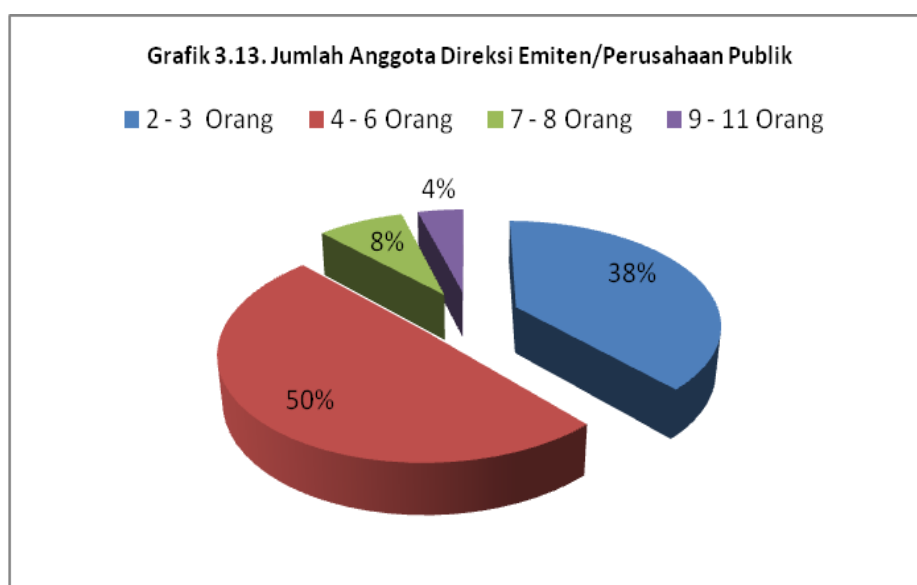
No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan	(%)	Jml Anggota Direksi
1.	Sektor Jasa	245	245	100	2-11
2.	Sektor Riil	177	177	100	2-11
	TOTAL	422	422	100	

Tabel 3.40. Jumlah Anggota Direksi pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Anggota Direksi
1.	Perbankan	33	33	100	3-11
2.	Asuransi	11	11	100	2-5
3.	Sekuritas dan Investasi	26	26	100	2-5
4.	Pembiayaan	22	22	100	2-7
5.	Perdagangan	35	35	100	2-10
6.	Media dan teknologi Informasi	16	16	100	2-8
7.	Properti dan real Estate	46	46	100	2-10
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	11	100	3-7
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	20	100	2-6
10.	Perhubungan/transportasi	18	18	100	2-7
11.	Telekomunikasi	7	7	100	3-8
	TOTAL	245			

Tabel 3.41. Jumlah Anggota Direksi pada Emiten/PP Sektor Riil

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Anggota Direksi
1.	Tekstil & Garment	20	20	100	2-7
2.	Alas Kaki	3	3	100	3-4
3.	Barang Konsumsi	32	32	100	2-10
4.	Aneka Industri lainnya	22	22	100	3-9
5.	Industri Dasar	27	27	100	2-11
6.	Kimia	10	10	100	2-6
7.	Logam	15	15	100	2-6
8.	Pertambangan	22	22	100	2-7
9.	Agribisnis	26	26	100	2-8
	TOTAL	177	177	100	



Berdasarkan data di atas, sama halnya dengan tahun 2008, seluruh Emiten dan Perusahaan Publik baik dari sektor jasa maupun sektor riil telah menginformasikan tentang keberadaan Direksi dalam Laporan Tahunan, dengan jumlah direksi bervariasi antara 2 sampai dengan 11 direksi.

14. Jumlah Anggota Direktur Independen

Tabel.3.42. Jumlah Anggota Direksi yang merupakan Pihak Independen dari Emiten/PP

No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan	(%)	Jml Anggota Direksi Independen
1.	Sektor Jasa	245	25	10,20	1-5
2.	Sektor Riil	177	15	8,47	1-3
	TOTAL	422	40	9,47	

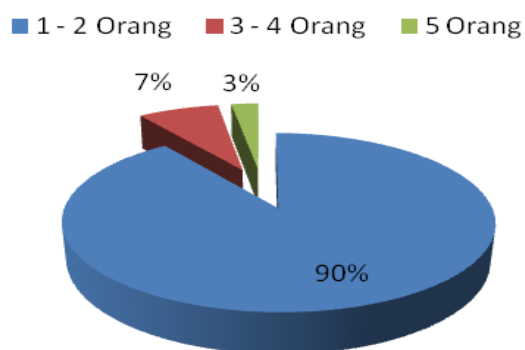
Tabel 3.43. Jumlah Anggota Direksi yang merupakan Pihak Independen pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Anggota Direksi Independen
1.	Perbankan	33	3	9,09	2-5
2.	Asuransi	11	0	0	0
3.	Sekuritas dan Investasi	26	2	7,69	1
4.	Pembiayaan	22	1	4,55	1
5.	Perdagangan	35	0	0	0
6.	Media dan teknologi Informasi	16	2	12,50	1
7.	Properti dan real Estate	46	7	15,22	1-2
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	3	27,27	1
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	1	5	1
10.	Perhubungan/transportasi	18	3	16,67	1-3
11.	Telekomunikasi	7	3	42,86	1-2
	TOTAL	245			

Tabel 3.44. Jumlah Anggota Direksi yang merupakan Pihak Independen pada Emiten/PP Sektor Riil

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Anggota Direksi Independen
1.	Tekstil & Garment	20	1	5	1
2.	Alas Kaki	3	0	0	0
3.	Barang Konsumsi	32	1	3,12	2
4.	Aneka Industri lainnya	22	2	9,09	1
5.	Industri Dasar	27	6	22,2	1
6.	Kimia	10	0	0	0
7.	Logam	15	1	6,67	1
8.	Pertambangan	22	2	9,09	1-3
9.	Agribisnis	26	2	7,69	1
	TOTAL	177			

Grafik 3.14. Jumlah Anggota Direksi yang merupakan Pihak Independen dari Emiten/Perusahaan Publik



Berdasarkan data di atas, dari 422 Emiten dan Perusahaan Publik hanya 40 Perusahaan (9,47%) menginformasikan tentang keberadaan Direksi Independen dengan jumlah antara 1 sampai dengan 5 orang. sebagian besar perusahaan yaitu 382 Perusahaan (90,53%) tidak menginformasikan keberadaan Direksi independen. Dari jumlah yang menginformasikan sebanyak, sebanyak 25 perusahaan (10,20%) merupakan Emiten dan Perusahaan Publik dari Sektor Jasa sedangkan 15 perusahaan (8,47) dari Sektor Riil, dengan jumlah direksi independen berkisar antara 1 sampai dengan 3 orang.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2008, jumlah perusahaan yang mengungkapkan meningkat sebesar 1,63% dimana pada tahun 2008, sebanyak 33 perusahaan (7,84%) dari 421 Emiten/Perusahaan Publik telah menginformasikan hal tersebut. Emiten/Perusahaan Publik yang mengungkapkan terdiri dari 18 (7,47%) dari sektor jasa dan sebanyak 15 (8,33%) dari sektor riil dengan jumlah direksi independen berkisar antara satu sampai dengan 3 (tiga) orang.

Dari semua Emiten/Perusahaan Publik yang mengungkapkan informasi mengenai jumlah direksi independen, hampir seluruhnya (90%) mempunyai direktur independen berkisar antara satu sampai dengan 2 (dua) orang.

15. Jumlah Rapat Direksi Dalam 1 Tahun

Tabel.3.45. Jumlah Rapat Direksi selama 1 tahun pada Emiten/PP

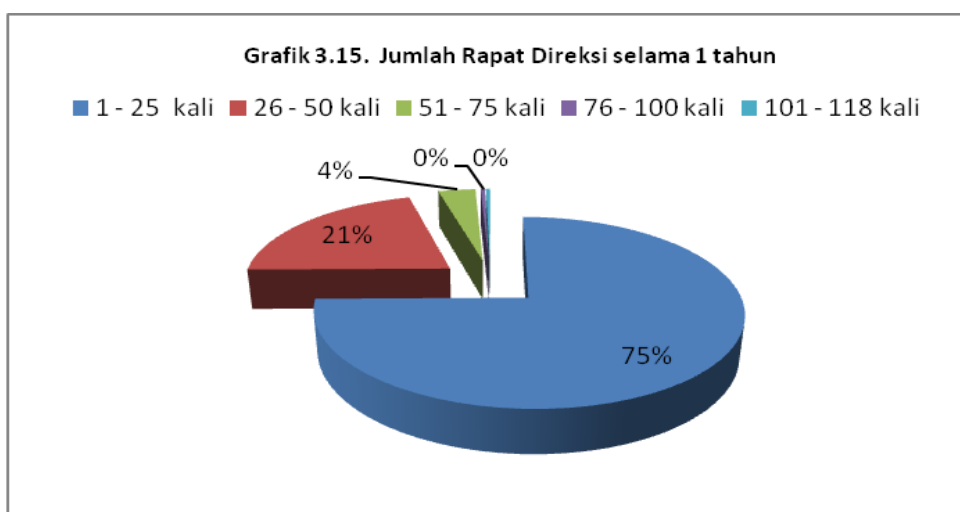
No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan	(%)	Jml Rapat
1.	Sektor Jasa	245	151	61,63	1-118
2.	Sektor Riil	177	111	62,7	1-50
	TOTAL	422	262	62,08	

Tabel 3.46. Jumlah Rapat Direksi selama 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Rapat
1.	Perbankan	33	31	93,94	2-118
2.	Asuransi	11	8	72,73	3-49
3.	Sekuritas dan Investasi	26	13	50	2-48
4.	Pembiayaan	22	15	68,18	4-28
5.	Perdagangan	35	21	60	6-48
6.	Media dan teknologi Informasi	16	9	56,25	2-48
7.	Properti dan real Estate	46	22	47,83	1-79
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	5	45,45	7-51
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	12	40	4-52
10.	Perhubungan/transportasi	18	10	55,55	5-51
11.	Telekomunikasi	7	5	71,43	12-57
	TOTAL	245			

Tabel 3.47. Jumlah Rapat Direksi selama 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Riil

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Rapat
1.	Tekstil & Garment	20	9	45	3-43
2.	Alas Kaki	3	3	100	5-48
3.	Barang Konsumsi	32	20	62,5	4-48
4.	Aneka Industri lainnya	22	20	90,9	4-49
5.	Industri Dasar	27	16	59,25	3-50
6.	Kimia	10	8	80	3-35
7.	Logam	15	8	53,3	2-12
8.	Pertambangan	22	14	63,6	7-47
9.	Agribisnis	26	13	50	1-24
	TOTAL	177			



Dari 422 Emiten dan Perusahaan Publik, yang menyajikan informasi tentang jumlah rapat direksi dalam 1 tahun sebanyak 262 perusahaan (62,08%) terdiri dari 151 (61,63%) perusahaan Sektor Jasa dan 111 (62,70%) perusahaan Sektor Riil. Jumlah rapat direksi dalam 1 tahun berkisar antara 1 sampai dengan 118 kali.

Informasi tentang jumlah rapat direksi dalam 1 tahun pada laporan tahunan 2009 jika dibandingkan dalam laporan tahunan 2008 meskipun sangat rendah menurun sebesar 0,39%. Pada laporan tahunan 2008, dari 421 Emiten/Perusahaan Publik yang menginformasikan tentang jumlah rapat Direksi selama 1 tahun sebanyak 263 (62,47%), terdiri dari 151 atau (62,66%) dari sektor jasa dan sebanyak 112 atau (62,66%) dari sektor riil dengan jumlah rapat Direksi selama 1 tahun berkisar antara 1 sampai dengan 120 kali dalam setahun.

16. Jumlah Kehadiran Anggota Direksi Dalam Rapat Direksi Dalam 1 Tahun

Tabel.3.48. Jumlah Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi selama 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Jasa

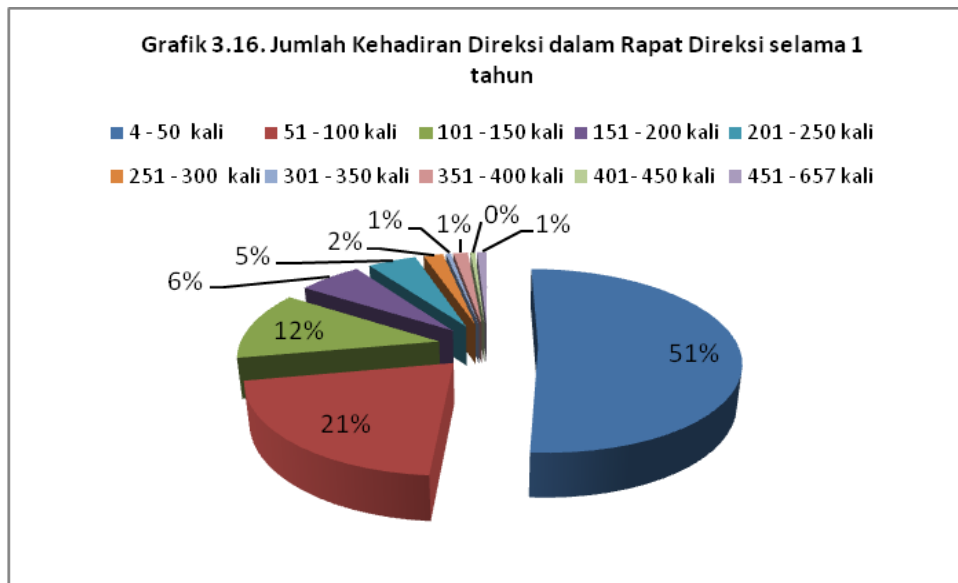
No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan	(%)	Jml Kehadiran
1.	Sektor Jasa	245	122	49,79	4-657
2.	Sektor Riil	177	93	52,54	4-294
	TOTAL	422	215	50,95	

Tabel 3.49. Jumlah Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi selama 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Kehadiran
1.	Perbankan	33	29	87,88	4-657
2.	Asuransi	11	7	63,64	12-108
3.	Sekuritas dan Investasi	26	9	34,62	8-126
4.	Pembiayaan	22	12	54,55	12-72
5.	Perdagangan	35	15	42,86	16-196
6.	Media dan teknologi Informasi	16	8	50	10-216
7.	Properti dan real Estate	46	19	41,30	7-375
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	4	36,36	35-236
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	5	25	18-132
10.	Perhubungan/transportasi	18	9	50	20-237
11.	Telekomunikasi	7	5	71,43	72-358
	TOTAL	245			

Tabel 3.50. Jumlah Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi selama 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Riil

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten			
1.	Tekstil & Garment	20	8	40	12-113
2.	Alas Kaki	3	2	66,67	15-30
3.	Barang Konsumsi	32	16	50	12-234
4.	Aneka Industri lainnya	22	19	68,18	20-294
5.	Industri Dasar	27	13	48,14	12-135
6.	Kimia	10	8	80	12-182
7.	Logam	15	8	53,3	6-60
8.	Pertambangan	22	11	50	15-256
9.	Agribisnis	26	12	46,15	4-120
	TOTAL	177			



Berdasarkan 422 Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik diketahui sebanyak 215 Emiten/Perusahaan Publik (50,95%) menyajikan informasi tentang Jumlah kehadiran Direksi dalam rapat Direksi selama 1 tahun. Jumlah kehadiran direksi berkisar antara 4 sampai 657 kali. Dari jumlah tersebut sebanyak 122 perusahaan (49,79%) dari Sektor Jasa dengan frekuensi kehadiran antara 4 sampai dengan 657 kali dan sebanyak 93 perusahaan (52,54%) Sektor Riil, dengan frekuensi kehadiran antara 4 sampai dengan 294 kali dalam setahun. Industri Perbankan merupakan perusahaan yang paling tinggi jumlah rapat dan tingkat kehadiran direksi. Sedangkan industri yang paling sedikit jumlah rapat dan kehadiran direksinya adalah industri Barang Konsumsi.

Berdasarkan data tahun 2008, dari 421 Emiten/Perusahaan Publik terdapat 203 (48,22%) perusahaan yang menginformasikan jumlah kehadiran Direksi dalam rapat Direksi selama 1 tahun, terdiri dari 122 (50,62%) dari sektor jasa dan 85 (47,22%) dari sektor riil dengan jumlah kehadiran berkisar antara 4 sampai dengan 841 kali dalam setahun. Dengan demikian jumlah perusahaan yang menginformasikan hal tersebut meningkat sebesar 2,73%.

17. Jumlah Kehadiran Direksi Dalam Rapat Gabungan Antara Dewan Komisaris Dengan Direksi

Tabel.3.51. Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris selama 1 tahun

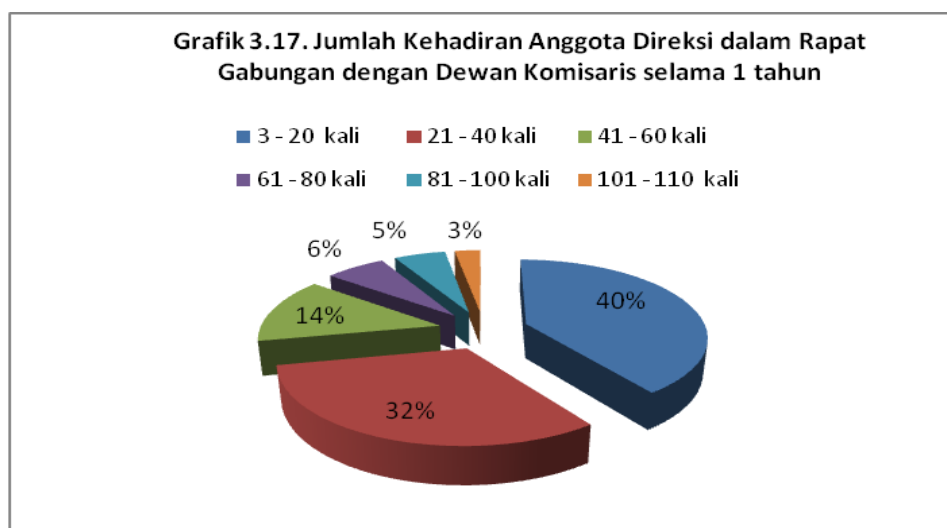
No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan	(%)	Jml Kehadiran
1.	Sektor Jasa	245	69	28,16	3-110
2.	Sektor Riil	177	41	23,16	4-105
	TOTAL	422	110	26,06	

Tabel 3.52. Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris selama 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Kehadiran
1.	Perbankan	33	18	54,55	3-94
2.	Asuransi	11	1	9,09	20
3.	Sekuritas dan Investasi	26	8	30,77	4-48
4.	Pembiayaan	22	6	27,27	12-36
5.	Perdagangan	35	4	11,43	12-72
6.	Media dan teknologi Informasi	16	7	43,75	9-48
7.	Properti dan real Estate	46	10	21,80	12-72
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	3	27,27	24-55
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	4	20	18-36
10.	Perhubungan/transportasi	18	6	33,33	12-67
11.	Telekomunikasi	7	2	28,57	12-110
	TOTAL	245			

Tabel 3.53. Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris selama 1 tahun pada Emiten/PP Sektor Riil

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten			
1.	Tekstil & Garment	20	1	15	16
2.	Alas Kaki	3	2	66,67	4-12
3.	Barang Konsumsi	32	8	25	12-105
4.	Aneka Industri lainnya	22	4	18,18	36-72
5.	Industri Dasar	27	7	25,9	6-70
6.	Kimia	10	3	30	7-12
7.	Logam	15	3	20	8-60
8.	Pertambangan	22	7	31,8	6-103
9.	Agribisnis	26	6	23,07	11-57
	TOTAL	177			



Berdasarkan tabel di atas, Emiten dan Perusahaan Publik yang menyajikan informasi tentang jumlah kehadiran Direksi dalam rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi hanya 110 perusahaan atau 26,06%, sebagian besar (73,94%) tidak mengungkapkan. Jumlah kehadiran Direksi dalam rapat gabungan berkisar antara 3 sampai 110 kali.

Dari 110 perusahaan yang menyajikan informasi tersebut sebanyak 69 perusahaan (28,16%) dari Sektor Jasa, dengan jumlah kehadiran antara 3 sampai 110 kali. Sebanyak 41 perusahaan (23,16%) dari Sektor Riil, dengan jumlah kehadiran berkisar antara 4 sampai 105 kali.

Data tahun 2008 menunjukkan, dari 421 Emiten/Perusahaan Publik hanya 116 perusahaan (27,55%) yang menginformasikan hal tersebut terdiri dari 74 (30,71%) dari sektor jasa dan 42 (23,33%) dari sektor riil dengan jumlah kehadiran berkisar antara 4 sampai dengan 419 kali dalam setahun. Dengan demikian dibandingkan dengan 2009, jumlah Emiten/Perusahaan Publik yang mengungkapkan informasi jumlah kehadiran Direksi dalam rapat gabungan dengan komisaris dan atau komite audit menurun sebesar 1,49%.

18. Unit Audit Internal

Tabel.3.54. Pengungkapan dan Jumlah Anggota Unit Audit Internal

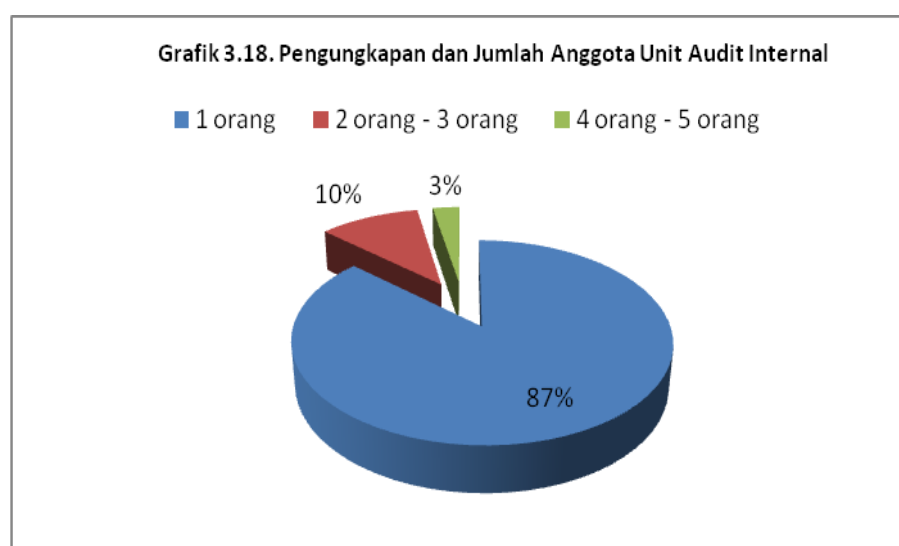
No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan	(%)	Jml Anggota
1.	Sektor Jasa	245	110	44,89	1-4
2.	Sektor Riil	177	33	18,64	1
	TOTAL	422	143	33,88	

Tabel 3.55. Pengungkapan dan Jumlah Anggota Unit Audit Internal pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Anggota
1.	Perbankan	33	20	60,61	1-3
2.	Asuransi	11	8	72,73	1-3
3.	Sekuritas dan Investasi	26	11	42,31	1
4.	Pembiayaan	22	14	63,64	1
5.	Perdagangan	35	7	20	1-4
6.	Media dan teknologi Informasi	16	7	43,75	1
7.	Properti dan real Estate	46	21	45,65	1-3
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	4	36,36	1-4
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	8	40	1-2
10.	Perhubungan/transportasi	18	8	44,44	1-4
11.	Telekomunikasi	7	2	28,57	1
	TOTAL	245			

Tabel 3.56. Pengungkapan dan Jumlah Anggota Unit Audit Internal pada Emiten/PP Sektor Riil

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Anggota
1.	Tekstil & Garment	20	2	10	1
2.	Alas Kaki	3	0	0	0
3.	Barang Konsumsi	32	9	28,12	1-3
4.	Aneka Industri lainnya	22	6	27,27	1
5.	Industri Dasar	27	2	10	1-3
6.	Kimia	10	1	10	1
7.	Logam	15	1	6,7	1
8.	Pertambangan	22	4	18,18	1
9.	Agribisnis	26	8	30,76	1-5
	TOTAL	177			



Berdasarkan tabel di atas, hanya 143 perusahaan (33,88%) dari 422 Emiten dan Perusahaan Publik yang menyajikan informasi tentang jumlah Anggota Unit Audit Internal, sebagian besar perusahaan tidak menginformasikan hal tersebut. Dari jumlah tersebut 110 Emiten/Perusahaan Publik (44,89%) dari Sektor Jasa dan 33 perusahaan (18,64%) dari Sektor Riil. Bapepam-LK memang belum mewajibkan Emiten dan Perusahaan publik untuk mengungkapkan keberadaan Unit Audit Internal dalam laporan tahunannya. Namun demikian berdasarkan peraturan Bapepam-LK No.X.I.7. Emiten dan Perusahaan Publik wajib membentuk Unit Audit Internal sejak awal tahun 2009.

19. Jumlah Pihak Pemegang Saham yang memiliki 5% atau Lebih

Tabel.3.57. Jumlah Pihak Pemegang saham yang memiliki 5%atau Lebih pada Emiten/PP

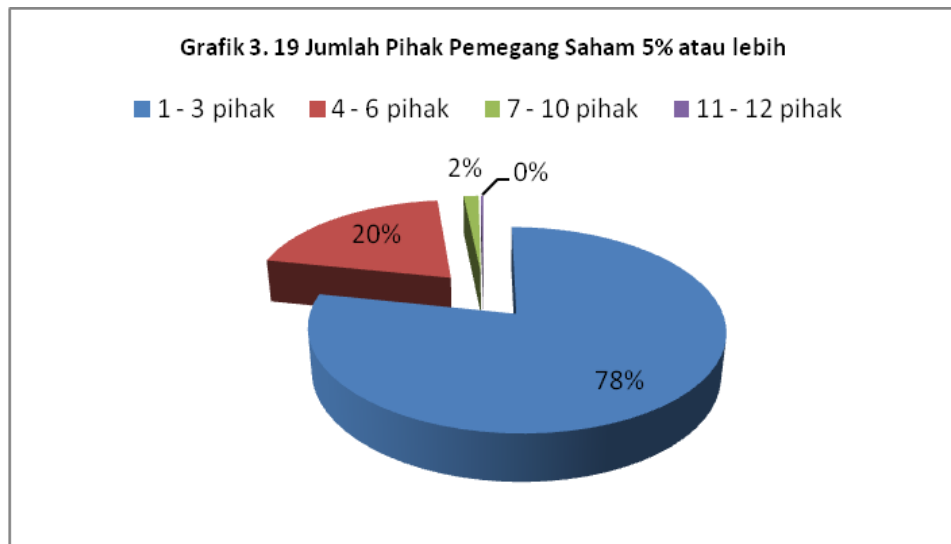
No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan	(%)	Jml Pemegang Saham
1.	Sektor Jasa	245	241	98,36	1-7
2.	Sektor Riil	177	177	100	1-12
	TOTAL	422	418	99,05	

Tabel 3.58. Jumlah Pihak Pemegang saham yang memiliki 5% atau Lebih pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Pemegang Saham
1.	Perbankan	33	33	100	1-3
2.	Asuransi	11	11	100	1-5
3.	Sekuritas dan Investasi	26	25	96,15	1-5
4.	Pembiayaan	22	22	100	1-4
5.	Perdagangan	35	34	97,14	1-6
6.	Media dan teknologi Informasi	16	16	100	1-5
7.	Properti dan real Estate	46	45	97,83	1-7
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	10	90,91	1-4
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	20	100	2-6
10.	Perhubungan/transportasi	18	18	100	1-5
11.	Telekomunikasi	7	7	100	1-3
	TOTAL	245			

Tabel 3.59. Jumlah Pihak Pemegang saham yang memiliki 5% atau Lebih pada Emiten/PP Sektor Riil

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jml Pemegang Saham
1.	Tekstil & Garment	20	20	100	1-12
2.	Alas Kaki	3	3	100	1-2
3.	Barang Konsumsi	32	32	200	1-7
4.	Aneka Industri lainnya	22	22	100	1-7
5.	Industri Dasar	27	27	100	1-6
6.	Kimia	10	10	100	1-6
7.	Logam	15	15	100	1-6
8.	Pertambangan	22	22	100	1-6
9.	Agribisnis	26	26	100	1-7
	TOTAL	177			



Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hampir seluruh Emiten/Perusahaan Publik (99,05%) dari 422 perusahaan telah menyajikan informasi tentang jumlah pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih. Hanya 4 Perusahaan (0,95%) yang tidak menyajikan informasi tersebut. Jumlah pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih berkisar antara 1 – 12 pihak.

Dari 418 Emiten/Perusahaan Publik yang menyajikan informasi tersebut sebanyak 241 perusahaan(98,36%) dari Sektor Jasa, dengan jumlah berkisar antara 1 sampai 7 pihak. Untuk Sektor Riil, seluruh perusahaan yaitu 177 perusahaan telah mengungkapkan dengan jumlah pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih berkisar antara 1 sampai 12 pihak.

Sebagian besar perusahaan (78%) mempunyai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih berkisar antara satu sampai dengan 3 (tiga) pihak.

20. Jumlah Prosentase Saham yang dimiliki Publik/Masyarakat

Tabel.3.60. Jumlah Prosentase saham yang dimiliki Publik/Masyarakat pada Emiten/PP

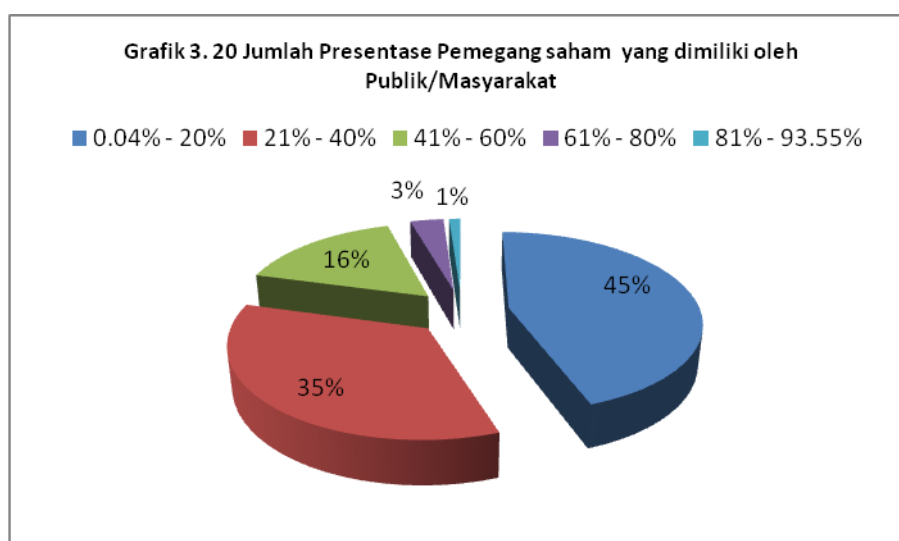
No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Emiten/PP yang mengungkapkan	(%)	Jumlah Saham (%)
1.	Sektor Jasa	245	204	83,26	0,04-93,55
2.	Sektor Riil	177	157	88,70	0,04-82,13
	TOTAL	422	361	85,55	

Tabel 3.61. Jumlah Prosentase saham yang dimiliki Publik/Masyarakat pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jumlah Saham (%)
1.	Perbankan	33	25	75,76	0,04-49,62
2.	Asuransi	11	9	81,82	1,06-34,8
3.	Sekuritas dan Investasi	26	22	88,62	3,65-79,95
4.	Pembiayaan	22	10	45,45	4,6-45
5.	Perdagangan	35	30	85,71	2-57,62
6.	Media dan teknologi Informasi	16	15	93,75	0,1-85
7.	Properti dan real Estate	46	43	93,48	0,1-93,55
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	8	72,72	18,95-6,45
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	19	95	6,52-49,14
10.	Perhubungan/transportasi	18	17	94,44	0,11-68,60
11.	Telekomunikasi	7	6	85,71	0,20-52,69
	TOTAL	245			

Tabel 3.62. Jumlah Prosentase saham yang dimiliki Publik/Masyarakat pada Emiten/PP Sektor Riil

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jumlah Saham (%)
1.	Tekstil & Garment	20	18	90	0,08-80,44
2.	Alas Kaki	3	3	100	14,20-30
3.	Barang Konsumsi	32	31	96,87	1-66,93
4.	Aneka Industri lainnya	22	18	81,81	0,04-70,29
5.	Industri Dasar	27	22	81,48	0,25-44,5
6.	Kimia	10	10	100	9,51-53,95
7.	Logam	15	15	100	2,41-42,17
8.	Pertambangan	22	20	90,91	3,11-82,13
9.	Agribisnis	26	22	84,62	2-72,38
	TOTAL	177			



Berdasarkan tabel di atas, hampir seluruh Emiten dan Perusahaan Publik yaitu 361 perusahaan (85,55%) dari 422 perusahaan telah menyajikan informasi tentang saham yang dimiliki oleh publik. Jumlah saham yang dipegang oleh publik atau masyarakat mempunyai kisaran yang sangat luas yaitu antara 0,04% - 93,55%.

Dari jumlah tersebut, 204 Emiten/Perusahaan Publik (83,26%) berasal dari Sektor Jasa, dengan jumlah pemegang saham Publik/Masyarakat berkisar antara 0,04% sampai dengan 93,55%pihak. Sedangkan dari Sektor Riil berjumlah 157 Emiten/Perusahaan Publik (88,70%) dengan jumlah pemegang saham Publik/Masyarakat berkisar antara 0,04% sampai dengan 82,13%.

Dari grafik di atas terlihat bahwa paling banyak perusahaan (45%) mempunyai jumlah kepemilikan saham Emiten/Perusahaan Publik oleh masyarakat/publik sebesar 0,04% sampai dengan 20%. Jumlah terbanyak kedua adalah jumlah kepemilikan masyarakat sebesar 20% sampai dengan 40% saham perusahaan yaitu dimiliki oleh 35% Emiten/Perusahaan Publik.

21. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel.3.63. Pengungkapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

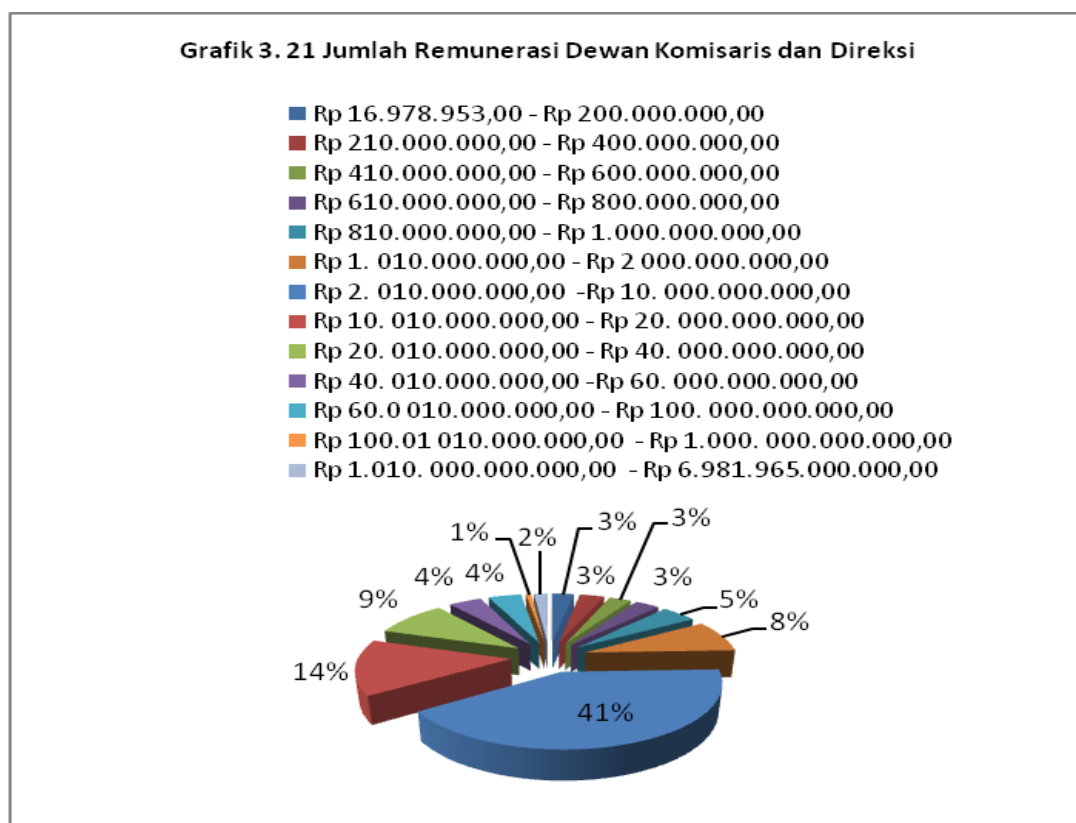
No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Yang mengungkapkan	(%)	Jumlah Remunerasi (Rp)
1.	Sektor Jasa	245	168	68,57	16,978,953 - 6.981,695,000,000
2.	Sektor Riil	177	123	69,49	157.404.000 - 2.892.842.000.000
	TOTAL	422	291	68,95	

Tabel 3.64. Pengungkapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jumlah Remunerasi (Rp)
1.	Perbankan	33	29	87,88	27.020.300 - 6.981.965.000.000
2.	Asuransi	11	10	90,91	1.311.933.179 - 7.243.737.994
3.	Sekuritas dan Investasi	26	15	57,69	483.000.000 - 19.024.382.000
4.	Pembiayaan	22	20	90,91	462.914.950 - 33.607.000.000
5.	Perdagangan	35	12	34,29	32.870.000 - 20.998.000.000
6.	Media dan teknologi Informasi	16	10	62,5	210.000.000 - 1.824.000.000.000
7.	Properti dan real Estate	46	34	73,91	218.400.000 - 25.036.885.191
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	10	90,90	445.597.600 - 41.000.000.000
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	7	35	168.000.000 - 4.900.000.000
10.	Perhubungan/transportasi	18	15	83,33	16.978.953 - 2.892.842.000
11.	Telekomunikasi	7	6	85,71	6.787.479.138 - 69.733.600.000
	TOTAL	245			

Tabel 3.65. Pengungkapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi pada Emiten/PP Sektor Riil

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Jumlah Remunerasi (Rp)
1.	Tekstil & Garment	20	11	55	157.404.000 - 72.000.000.000
2.	Alas Kaki	3	3	100	2.788.236.507 - 48.415.847.980
3.	Barang Konsumsi	32	23	71,88	912.130.551 - 1.714.273.000.000
4.	Aneka Industri lainnya	22	14	63,64	1.213.096.890 - 64.610.000.000
5.	Industri Dasar	27	19	70,37	413.600.000 - 2.892.842.000.000
6.	Kimia	10	8	80	170.989.556 - 55.773.000.000
7.	Logam	15	11	73,33	333.500.000 - 32.900.000.000
8.	Pertambangan	22	18	81,82	250.000.000 - 97.760.000.000
9.	Agribisnis	26	16	61,54	801.600.000 - 78.762.675.200
	TOTAL	177			



Berdasarkan tabel di atas, dari 422 Emiten dan Perusahaan Publik sebanyak 291 Emiten/Perusahaan Publik atau 68,95% telah menyajikan informasi tentang remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi pada umumnya disajikan dalam jumlah total tidak per individu. Besaran remunerasi

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berkisar antara Rp.16.978.953,- sampai dengan Rp. 6.981.695.000.000,-.

Dari 291 perusahaan, sebanyak 168 Emiten/Perusahaan Publik (68,57%) berasal dari Sektor Jasa, dengan jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berkisar antara Rp. 16.978.953,- sampai dengan Rp. 6.981.695.000.000,-. Sebanyak 123 Emiten/Perusahaan Publik (69,49%) dari Sektor Riil dengan jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berkisar antara Rp.157.404.000,- sampai dengan Rp. 2.892.842.000.000,-.

Remunerasi dewan komisaris dan direksi dengan kisaran jumlah Rp. 16.978.953,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- merupakan jumlah yang paling banyak dimiliki oleh Emiten dan Perusahaan Publik yaitu sebesar 45%.

22. Kode Etik Perusahaan

Tabel.3.66. Pengungkapan Kode Etik Perusahaan

No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Yang mengungkapkan	(%)	Kode Etik
1.	Sektor Jasa	245	59	24,08	Ada
2.	Sektor Riil	177	27	15,25	Ada
	TOTAL	422	86	20,37	

Tabel 3.67. Pengungkapan Kode Etik Perusahaan pada Emiten/PP Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang Mengungkapkan	%	Kode Etik
1.	Perbankan	33	14	42,42	Ada
2.	Asuransi	11	1	9,09	Ada
3.	Sekuritas dan Investasi	26	8	30,77	Ada
4.	Pembiayaan	22	7	31,82	Ada
5.	Perdagangan	35	8	22,86	Ada
6.	Media dan teknologi Informasi	16	2	12,5	Ada
7.	Properti dan real Estate	46	8	17,39	Ada
8.	Konstruksi & jasa lainnya	11	4	36,36	Ada
9.	Pariwisata & Perhotelan	20	3	15	Ada
10.	Perhubungan/transportasi	18	0	0	0
11.	Telekomunikasi	7	4	57,14	Ada
	TOTAL	245			

Tabel 3.68. Pengungkapan Kode Etik Perusahaan pada Emiten/PP Sektor Riil

No	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Yang mengungkapkan	(%)	Kode Etik
1.	Tekstil & Garment	20	1	5	Ada
2.	Alas Kaki	3	0	0	0
3.	Barang Konsumsi	32	2	6,25	Ada
4.	Aneka Industri lainnya	22	3	13,6	Ada
5.	Industri Dasar	27	5	18,5	Ada
6.	Kimia	10	1	10	Ada
7.	Logam	15	2	13,3	Ada
8.	Pertambangan	22	9	33,3	Ada
9.	Agribisnis	26	4	14,8	Ada
	TOTAL	177			

Berdasarkan tabel di atas, dari 422 Emiten dan Perusahaan Publik hanya masih sedikit sekali yaitu 86 perusahaan atau 20,37% yang menyajikan informasi mengenai keberadaan Kode Etik di perusahaan. Namun demikian tidak dapat dipastikan bahwa sebagian besar Emiten dan Perusahaan Publik (79,62%) tidak memiliki kode etik yang berlaku di perusahaan mengingat dalam kajian ini tidak dilakukan konfirmasi langsung kepada Emiten dan Perusahaan Publik. Informasi hanya berdasarkan laporan tahunan saja.

Tabel 3.69. Kepemilikan Organ Perusahaan dan Pendukung Organ Perusahaan pada Sektor Jasa

No	Jenis Industri	Total Perusahaan	Jumlah Persentase yang mengungkapkan (%)																					
			Jumlah anggota Dewan Komisaris	Jumlah Komisaris Terafiliasi	Jumlah Komisaris Independen	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat selama 1 tahun	Jumlah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dalam 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan selama 1 tahun	Jumlah Anggota Komite Audit	Jumlah Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen	Jumlah Rapat Komite Audit dalam 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat selama 1 tahun	Jumlah Komite Lain	Jumlah Direksi	Jumlah Direktur Independen	Jumlah Rapat Direksi dalam 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat selama 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Gabungan selama 1 tahun	Unit audit Internal	Jumlah Pihak Pemegang Saham 5% atau lebih	Pemegang saham Publik/Masyarakat	Remunerasi Direksi dan Komisaris	Kode Etik perusahaan
1	Perbankan	33	33 (100%)	4 (12,12%)	32 (96,97%)	31 (93,94%)	29 (87,88%)	20 (60,61%)	18 (54,55%)	33 (100%)	30 (90,91%)	23 (69,70%)	22 (66,67%)	33 (100%)	33 (100%)	3 (9,09%)	31 (93,94%)	29 (87,88%)	18 (54,55%)	20 (60,61%)	33 (100%)	25 (75,76%)	29 (87,88%)	14 (42,42%)
			2 sd 8	1 sd 2	1 sd 4	3 s.d 51	5 s.d 293	1 s.d 76	3 s.d 129	3 s/d 7	1 s/d 4	3 s/d 33	6 s/d 158	2 sd 12	3 sd 11	2 sd 5	2 sd 118	4 sd 657	3 sd 94	1 sd 3	1 sd 3	0,04% sd 49,62	27.020.300 sd 6.981.965.000.000	1
2	Asuransi	11	11 (100%)	1 (9,09%)	11 (100%)	8 (72,73%)	8 (72,73%)	2 (18,18%)	1 (9,09%)	11 (100%)	11 (100%)	5 (45,45%)	5 (45,45%)	1 (9,09%)	11 (100%)	0 (0%)	8 (72,73%)	7 (63,64%)	1 (9,09%)	8 (72,73%)	11 (100%)	9 (81,82%)	10 (90,91%)	1 (9,09%)
			2 sd 5	2	1 sd 2	2 s.d 12	5 s.d 36	5 s.d 12	15	2 s/d 5	1 s/d 2	4 s/d 20	12 s/d 54	2	2 sd 5	0	3 sd 49	12 sd 108	20	1 sd 3	1 sd 5	1,06% sd 34,8	1.311.933.179 sd 7.243.737.994	1
3	Sekuritas dan Investasi	26	26 (100%)	5 (19,23%)	24 (92,31%)	17 (65,38%)	13 (50%)	10 (38,46%)	8 (30,77%)	26 (100%)	22 (84,62%)	8 (30,77%)	5 (19,23%)	6 (23,07,26%)	26 (100%)	2 (7,69%)	13 (50%)	9 (34,62%)	8 (30,77%)	11 (42,31%)	25 (96,15%)	22 (84,62%)	15 (57,69%)	8 (30,77%)
			2 sd 6	1 sd 3	1 sd 3	1 s.d 35	3 s.d 120	2 s.d 43	4 s.d 63	1 s/d 4	1 s/d 3	4 s/d 12	11 s/d 36	1 sd 6	2 sd 5	1	2 sd 48	8 sd 126	4 sd 48	1	1 sd 5	3,65% sd 79,95%	483.000.000 sd 19.024.382.000	1
4	Pembiayaan	22	22 (100%)	6 (26,09%)	21 (95,45%)	15 (68,18%)	12 (54,55%)	7 (31,82%)	6 (27,27%)	21 (95,45%)	15 (68,18%)	13 (59,09%)	11 (50%)	9 (40,91%)	22 (100%)	1 (4,55%)	15 (68,18%)	12 (54,55%)	6 (27,27%)	14 (63,64%)	22 (100%)	10 (45,45%)	20 (90,91%)	7 (31,82%)
			2 sd 8	1 sd 2	1 sd 2	3 s.d 16	8 s.d 60	4 s.d 48	8 s.d 71	1 s/d 6	1 s/d 2	3 s/d 12	9 s/d 36	1 sd 5	2 sd 7	1	4 sd 28	12 sd 72	12 sd 36	1	1 sd 4	4,6% sd 45%	462.914.950 sd 33.607.000.000	1
5	Perdagangan	35	23 (100%)	4 (11,43%)	33 (94,29%)	17 (48,57%)	14 (40,00%)	5 (14,29%)	4 (11,43%)	33 (94,29%)	31 (88,57%)	16 (45,71%)	15 (42,86%)	11 (31,42%)	35 (100%)	0 (0%)	21 (60,00%)	15 (42,86%)	4 (11,43%)	7 (20,00%)	34 (97,14%)	30 (85,71%)	12 (34,29%)	8 (22,86%)
			2 sd 9	1 sd 2	1 sd 4	2 s.d 17	4 s.d 69	3 s.d 12	15 s.d 31	1 s/d 7	1 s/d 2	2 s/d 39	2 s/d 241	1 sd 7	2 sd 10	0	6 sd 48	16 sd 296	12 sd 72	1 sd 4	1 sd 6	2% sd 57,62%	32.870.000 sd 20.998.000.000	1
6	Media dan Teknologi Industri	16	16 (100%)	10 (62,50%)	16 (100%)	8 (50%)	8 (50%)	7 (43,75%)	7 (43,75%)	13 (81,25%)	11 (68,75%)	10 (62,50%)	8 (50%)	3 (18,75%)	16 (100%)	2 (12,50%)	9 (56,25%)	8 (50%)	7 (43,75%)	7 (43,75%)	16 (100%)	15 (93,75%)	10 (62,5%)	2 (12,5%)
			2 sd 8	1 sd 3	1 sd 7	1 s.d 12	2 s.d 44	2 s.d 10	6 sd 50	2 sd 5	1 sd 2	2 sd 12	5 sd 42	2	2 sd 8	1	2 sd 48	10 sd 216	9 sd 48	1	1 sd 5	0,1% sd 85%	210.000.000 sd 1.824.000.000	1

																							0.000	
7	Property dan Real Estate	8	46 (100%)	17 (36,95%)	45 (97,83%)	22 (47,83%)	20 (43,48%)	11 (23,91%)	10 (21,74%)	43 (93,48%)	41 (89,13%)	24 (52,17%)	19 (41,30%)	11 (23,91%)	46 (100%)	7 (15,22%)	22 (47,83%)	19 (41,30%)	10 (21,80%)	21 (45,65%)	45 (97,83%)	43 (93,48%)	34 (73,91%)	8 (17,39%)
			2 sd 22	1 sd 15	1 sd 7	2 s.d 60	4 s.d 252	3 s.d 16	8 sd 73	2 sd 5	1 sd 2	2 sd 30	4 sd 39	1 sd 5	2 sd 10	1 sd 2	1 sd 79	7 sd 375	12 sd 72	1 sd 3	1 sd 7	0,1% sd 93,55%	218.400.000 sd 25.036.885.191	1
8	Konstruksi dan Jasa Lainnya	11	11 (100%)	4 (36,36%)	10 (90,91%)	4 (36,36%)	3 (27,27%)	4 (36,36%)	3 (27,27%)	7 (63,64%)	7 (63,64%)	3 (27,27%)	3 (27,27%)	3 (27,27%)	11 (100%)	3 (27,27%)	5 (45,45%)	4 (36,36%)	3 (27,27%)	4 (36,36%)	10 (90,91%)	8 (72,72%)	10 (90,90%)	4 (36,36%)
			2 sd 8	1 sd 7	1 sd 2	1 s.d 12	4 s.d 29	2 s.d 43	8 sd 53	3 sd 5	1	7 sd 34	27 sd 157	1 sd 4	3 sd 7	1	7 sd 51	35 sd 236	24 sd 55	1 sd 4	1 sd 4	18,95% sd 6,45%	445.597.600 sd 41.000.000.000	1
9	Pariwisata dan Perhotelan	20	20 (100%)	15 (75%)	18 (90%)	13 (65%)	8 (40%)	5 (25%)	4 (20%)	19 (95%)	17 (85%)	7 (35%)	5 (25%)	3 (15%)	20 (100%)	1 (5%)	12 (60%)	5 (25%)	4 (20%)	8 (40%)	20 (100%)	19 (95%)	7 (35%)	3 (15%)
			2 sd 7	1 sd 5	1 sd 3	4 s.d 36	16 s.d 92	3 s.d 36	12 sd 61	2 sd 5	1	4 sd 52	12 sd 156	1 sd 5	2 sd 6	1	4 sd 52	18 sd 132	18 sd 36	1 sd 2	2 sd 6	6,52% sd 49,14%	168.000.000 sd 4.900.000.000	1
10	Perhubungan dan Transportasi	18	18 (100%)	10 (55,55%)	18 (100%)	10 (55,55%)	10 (55,55%)	6 (33,33%)	5 (27,77%)	18 (100%)	18 (100%)	7 (38,89%)	6 (33,33%)	7 (38,89%)	18 (100%)	3 (16,67%)	10 (55,55%)	9 (50%)	6 (33,33%)	8 (44,44%)	18 (100%)	17 (94,44%)	15 (83,33%)	0%
			2 sd 9	1 sd 3	1 sd 3	1 s.d 18	3 s.d 84	2 s.d 15	12 sd 66	2 sd 4	1 sd 2	2 sd 8	2 sd 12	1 sd 3	2 sd 7	1 sd 3	5 sd 51	20 sd 237	12 sd 67	1 sd 4	1 sd 5	0,11% sd 68,60%	16.978.953 sd 2.892.842.000	0
11	Telekomunikasi	7	7 (100%)	5 (71,43%)	7 (100%)	5 (71,43%)	5 (71,43%)	2 (28,57%)	2 (28,57%)	6 (85,71%)	6 (85,71%)	4 (57,14%)	4 (57,14%)	4 (57,14%)	7 (100%)	3 (42,86%)	5 (71,43%)	5 (71,43%)	2 (28,57%)	2 (28,57%)	7 (100%)	6 (85,71%)	6 (85,71%)	4 (57,14%)
			2 sd 10	1 sd 3	1 sd 3	1 s.d 14	3 s.d 65	2 s.d 16	9 sd 78	3 sd 6	1 sd 3	4 sd 34	9 sd 98	2 sd 11	3 sd 8	1 sd 2	12 sd 57	72 sd 358	12 sd 110	1	1 sd 3	0,20% sd 52,69%	6.787.479.138 sd 69.733.600.000	1
	Total	245	245 (100%)	81 (33,06%)	239 (97,55%)	152 (62,04%)	130 (53,28%)	79 (32,24%)	68 (27,76%)	230 (93,88%)	209 (85,30%)	120 (48,98%)	103 (42,04%)	91 (37,43%)	245 (100%)	25 (10,20%)	151 (61,63%)	122 (49,79%)	69 (28,16%)	110 (44,89%)	241 (98,36%)	204 (83,26%)	168 (68,57%)	59 (24,08%)
			2-22 orang	1 sd 15	1 sd 7	1 sd 60	2 sd 293	1 sd 76	3 sd 129	1 sd 7	1 sd 4	2 sd 52	2 sd 241	1 sd 12	2 sd 11	1 sd 5	1 sd 118	4 sd 657	3 sd 110	1 sd 4	1 sd 7	0,04% sd 93,55%	16.978.953 sd 2.892.842,000,000	1 (Ada)

Tabel 3.70. Kepemilikan Organ Perusahaan dan Pendukung Organ Perusahaan pada Sektor Riil

No.	Jenis Industri	Total Perusahaan	Jumlah Persentase yang mengungkapkan (%)																					
			Jumlah anggota Dewan Komisaris	Jumlah Komisaris Terafiliasi	Jumlah Komisaris Independen	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat selama 1 tahun	Jumlah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dalam 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan selama 1 tahun	Jumlah Anggota Komite Audit	Jumlah Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen	Jumlah Rapat Komite Audit dalam 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat selama 1 tahun	Jumlah Komite Lain	Jumlah Direksi	Jumlah Direktur Independen	Jumlah Rapat Direksi dalam 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat selama 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Gabungan selama 1 tahun	Unit audit Internal	Jumlah Pihak Pemegang Saham 5% atau lebih	Jumlah Pemegang Saham Publik	Remunerasi Direksi dan Komisaris	Kode Etik perusahaan
1	Tekstil dan Garment	20	20 (100%)	3 (15%)	18 (90%)	10 (50%)	6 (30%)	4 (20%)	3 (15%)	17 (85%)	15 (75%)	10 (50%)	6 (30%)	1 (5%)	20 (100%)	1 (5%)	9 (45%)	8 (40%)	1 (5%)	2 (10%)	20 (100%)	18 (90%)	11 (55%)	1 (5%)
			2 s/d 9	2 s/d 9	1 s/d 4	1 s/d 38	1 s/d 43	4 s/d 16	12 s/d 126	2 s/d 4	1	4 s/d 12	8 s/d 19	1	2 s/d 7	1	3 s/d 43	12 s/d 113	16	1	1 s/d 12	0,08% s/d 80,44%	157.404.000 s/d 72.000.000.000	1
2	Alas Kaki	3	3 (100%)	0%	3 (100%)	2 (66,67%)	1 (33,33%)	2 (66,67%)	0 (0%)	3 (100%)	2 (66,7%)	2 (66,7%)	0%	3 (100%)	0%	3 (100%)	2 (66,67%)	2 (66,7%)	0%	3 (100%)	3 (100%)	3 (100%)	0 (0%)	
			3 s/d 5	0	1 s/d 2	02-Apr	8	03-Apr	0	3	1	4 s/d 12	12 s/d 36	0	3 s/d 4	0	5 s/d 48	15 s/d 30	4 s/d 12	0	1 s/d 2	14,20% s/d 30%	2.788.236.507 s/d 48.415.847.980	0
3	Barang Konsumsi	32	32 (100%)	4 (12,50%)	18 (59,38%)	21 (71,88%)	19 (59,38%)	11 (34,38%)	6 (18,75%)	30 (93,75%)	29 (90,62%)	14 (43,75%)	10 (31,25%)	7 (21,87%)	32 (100%)	1 (3,12%)	20 (62,5%)	16 (50%)	8 (25%)	9 (28,12%)	32 (100%)	31 (96,87%)	23 (71,88%)	2 (6,25%)
			2 s/d 10	1 s/d 3	1 s/d 3	1 s/d 14	1 s/d 47	4 s/d 46	6 s/d 57	1 s/d 5	1	1 s/d 34	3 s/d 60	1 s/d 4	2 s/d 10	2	4 s/d 48	12 s/d 234	12 s/d 105	1	1 s/d 7	1 s/d 66,93%	912.130.551 s/d 1.714.273.000.000	1
4	Aneka Industri Lainnya	22	22 (100%)	3 (13,64%)	19 (86,36%)	17 (77,27%)	14 (63,64%)	7 (31,82%)	4 (18,18%)	22 (100%)	17 (72,27%)	12 (54,54%)	11 (50%)	3 (13,6%)	22 (100%)	2 (9,09%)	20 (90,9%)	19 (68,18%)	4 (18,18%)	6 (27,27%)	22 (100%)	18 (81,81%)	14 (63,64%)	3 (13,6%)
			3 s/d 5	1 s/d 4	1 s/d 5	2 s/d 24	8 s/d 60	3 s/d 12	12 s/d 37	2 s/d 4	1 s/d 2	2 s/d 43	8 s/d 86	1 s/d 3	3 s/d 9	1	4 s/d 49	20 s/d 294	36 s/d 72	1	1 s/d 7	0,04 s/d 70,29%	1.213.096.890 s/d 64.610.000.000	1
5	Industri Dasar	27	27 (100%)	3 (11,11%)	23 (85,19%)	15 (55,56%)	9 (33,33%)	3 (11,11%)	23 (85,19%)	25 (92,59%)	21 (77,78%)	17 (62,96%)	16 (59,25%)	7 (25,9%)	27 (100%)	6 (22,2%)	16 (59,25%)	13 (48,14%)	7 (25,9%)	2 (7,40%)	27 (100%)	22 (81,48%)	19 (70,37%)	5 (18,5%)
			2 s/d 9	2 s/d 6	1 s/d 4	1 s/d 24	5 s/d 60	2 s/d 6	1 s/d 4	1 s/d 4	1 s/d 2	1 s/d 32	3 s/d 83	1 s/d 4	2 s/d 11	1	3 s/d 50	12 s/d 135	6 s/d 70	1	1 s/d 6	0,25 s/d 44,55%	413.600.000 s/d 2.892.842.000.000	1
6	Industri Kimia	10	10 (100%)	0%	10 (100%)	8 (80%)	7 (70%)	3 (30%)	2 (20%)	9 (90%)	9 (90%)	8 (80%)	7 (70%)	1 (10%)	10 (100%)	0%	8 (80%)	8 (80%)	3 (30%)	1 (10%)	10 (100%)	10 (100%)	8 (80%)	1 (10%)
			3 s/d 6		1 s/d 2	2 s/d 9	9 s/d 27	7 s/d 12	12 s/d 17	3 s/d 4	1 s/d 2	4 s/d 12	12 s/d 36	2	3 s/d 6	0	3 s/d 35	12 s/d 182	7 s/d 12	1	1 s/d 6	9,51 s/d 53,95%	170.989.556 s/d 55.773.000.000	1
7	Industri Logam	15	15 (100%)	5 (33,33%)	11 (73,33%)	6 (40%)	4 (26,67%)	3 (20%)	2 (13,33%)	14 (93,33%)	10 (66,67%)	5 (33,33%)	5 (33,33%)	3 (20%)	15 (100%)	1 (6,67%)	8 (53,3%)	8 (53,3%)	3 (20%)	1 (6,7%)	15 (100%)	15 (100%)	11 (73,33%)	2 (13,3%)

			2 sd 5	1 sd 2	1 sd 2	2 s.d 12	4 s.d 12	3 s.d 8	9 s.d 24	1 s/d 4	1	2 s/d 12	6 s/d 36	1	2 s/d 6	1	2 s/d 12	6 s/d 60	8 s/d 60	1	1 s/d 6	2,41 s.d 42,17%	333.500.000 s/d 32.900.000. 000	1
8	Pertamban gan	22	22 (100%)	2 (9,09%)	18 (81,82%)	14 (63,64%)	13 (59,09%)	10 (45,45%)	8 (36,36%)	20 (90,9%)	20 (90,90%)	9 (40,90%)	8 (36,36%)	9 (40,9%)	22 (100%)	2 (9,09%)	14 (63,6%)	11 (50%)	7 (31,8%)	4 (18,18 %)	22 (100%)	20 (90,91%)	18 (81,82%)	9(33,3 %)
			2 sd 10	1 sd 2	1 sd 3	2 s.d 27	4 s.d126	2 s.d 21	8 s.d 118	3 s/d 8	1 s/d 5	3 s/d 29	9 s/d 100	1 s/d 7	2 s/d 7	1 s/d 3	7 s/d 47	15 s/d 256	6 s/d 103	1	1 s/d 6	3,11 s/d 82,13%	250.000.000 s/d 97.760.000. 000	1
9	Agribisnis	26	26 (100%)	2 (7,69%)	22 (84,62%)	11 (42,31%)	10 (38,46%)	8 (30,77%)	5 (19,23%)	25 (96,15%)	21 (80,76%)	9 (34,6%)	9 (34,6%)	4 (15,38%)	26 (100%)	2 (7,69%)	13 (50%)	12 (46,15%)	6 (23,07%)	8 (30,76 %)	26 (100%)	22 (84,62%)	16 (61,54%)	4(14,8 %)
			2 sd 8	1 sd 2	1-3	1 s.d11	5 s.d 50	4 s.d 24	12 s.d 50	3 s/d 5	1 s / d 2	3 s/d 12	3 s/d 36	2 s/d 3	2 s/d 8	1	1 s/d 24	4 s/d 120	11 s/d 57	1	1 s/d 7	2 s/d 72,38%	801.600.000 s/d 78.762.675. 200	1
	Total	177	177 (100%)	22 (12,43 %)	155 (87,57%)	105 (59,32%)	83 (46,89%)	58 (32,77%)	39 (22,03%)	165 (93,22%)	144 (81,35%)	86 (48,58 %)	74 (41,8%)	31 (17,51%)	177 (100%)	15 (8,47%)	111 (62,7%)	93 (52,54%)	41 (23,165)	33 (18,64 %)	177 (100%)	157 (88,70%)	123 (69,49%)	27(15, 25%)
			2-10 Orang	1-6 Orang	1 sd 5	1 sd 38	1 s.d 126	1 s.d 46	2 s.d 126	1 s/d 8	1 s/d 7	1 s/d 43	3 s/d 100	1 s/d 7	2 s/d 11	1 s.d 3	1 s/d 50	4 sd 294	4 s/d 105	1	1 s/d 12	0,04% s/d 82,13%	157.404.000 s/d 2.892.842.0 00.000	1

Tabel. 3.71. Perbandingan Hasil Analisis Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik Tahun 2009 dan Tahun 2008

No.	Jenis Industri	Tahun	Total Perusahaan	Jumlah Persentase yang mengungkapkan (%)																
				Jumlah anggota Dewan Komisaris	Jumlah Komisaris Terafiliasi	Jumlah Komisaris Independen	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat selama 1 tahun	Jumlah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dalam 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan selama 1 tahun	Jumlah Anggota Komite Audit	Jumlah Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen	Jumlah Rapat Komite Audit dalam 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat selama 1 tahun	Jumlah Komite Lain	Jumlah Direksi	Jumlah Direktur Independen	Jumlah Rapat Direksi dalam 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat selama 1 tahun	Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Gabungan selama 1 tahun
1	Sektor Jasa	2009	245	245 (100%)	81 (33,06%)	235 (95,92%)	152 (62,04%)	130 (53,28%)	79 (32,24%)	68 (27,76%)	230 (93,88%)	209 (85,30%)	120 (48,98%)	103 (42,04%)	100 (40,81%)	245 (100%)	25 (10,20%)	151 (61,63%)	122 (49,79%)	69 (28,16%)
				2-22 orang	1 sd 15	1 sd 7	1 sd 60	2 sd 293	1 sd 76	3 sd 129	1 sd 7	1 sd 4	2 sd 52	2 sd 241	1 sd 12	2 sd 11	1sd 5	1 sd 118	4 sd 657	3 sd 110
		2008	241	241 (100%)	44 (18,26%)	230 (95,44%)	140 (58,09%)	115 (47,72%)	94 (39%)	79 (32,78%)	232 (96,27%)	197 (81,74%)	131 (54,36%)	100 (41,49%)	92 (38,17%)	241 (100%)	18 (7,47%)	151 (62,66%)	122 (50,62%)	74 (30,71%)
				1 sd 12	1 sd 6	1 sd 6	1 sd 61	2 sd 302	1 sd 72	4 sd 336	1 sd 7	1 sd 5	1 sd 51	2 sd 227	1 sd 11	2 sd 11	1 sd 63	1 sd 90	4 sd 841	4 sd 419
2	Sektor Riil	2009	177	177 (100%)	22 (12,43%)	153 (86,44%)	105(59,32%)	83 (46,89%)	58 (32,77%)	39 (22,03%)	165 (93,22%)	144 (81,35%)	86 (48,58%)	74 (41,8%)	35 (19,77%)	177 (100%)	15 (8,47%)	111 (62,7%)	93 (52,54%)	41 (23,165)
				2-10 Orang	1-6 Orang	1 sd 5	1 sd 38	1 s.d 126	1 s.d 46	2 s.d 126	1 s/d 8	1 s/d 7	1 s/d 43	3 s/d 100	1 s/d 7	2 s/d 11	1 s.d 3	1 s/d 50	4 sd 294	4 s/d 105
		2008	180	180 (100%)	37 (20,56%)	166 (92,22%)	104 (57,78%)	84 (46,67%)	151 (28,33%)	41 (23,2%)	165 (91,67%)	144 (80%)	94 (52,22%)	67 (37,22%)	29 (16,11%)	180 (100%)	15 (8,33%)	112 (62,22%)	85 (47,22%)	42 (23,33%)
				2 sd 10	1 sd 4	1 sd 5	1 sd 33	2 sd 165	1 sd 33	4 sd 72	1 sd 7	1 sd 4	1 sd 47	3 sd 176	1 sd 4	1 sd 11	1 sd 3	1 sd 64	8 sd 289	4 sd 208
TOTAL	TOTAL	2009	422	245 (100%)	103 (24,41%)	388 (91,94%)	257 (60,9%)	213 (50,47%)	137 (32,46%)	107 (25,36%)	395 (93,60%)	209 (85,30%)	206 (48,82%)	177 (41,94%)	135 (31,99%)	422 (100%)	40 (9,47%)	262(62,08%)	215 (50,95%)	110 (26,06%)
		2008	421	421 (100%)	81 (19,24%)	396 (94,06%)	244 (57,96%)	199 (47,27%)	145 (34,44%)	120 (28,50%)	397 (94,30%)	341 (81%)	225 (53,44%)	167 (39,67%)	121 (28,74%)	421 (100%)	33 (7,84%)	263 (62,47%)	203 (48,22%)	116 (27,55%)

BAB IV

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap pelaksanaan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan tahun 2009 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Belum seluruh Emiten dan Perusahaan Publik mengungkapkan informasi yang diwajibkan dalam peraturan Bapepam-LK No. X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik khususnya mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan sepanjang tahun 2009.
2. Pengungkapan mengenai pelaksanaan tata kelola Emiten/Perusahaan Publik tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008 terkait mengenai pengungkapan informasi jumlah rapat dan frekuensi kehadiran komisaris dan komite audit independen, Direksi Independen, jumlah rapat dan frekuensi kehadiran Direksi dalam rapat dan komite lainnya. Sedangkan pengungkapan informasi mengenai jumlah rapat gabungan dan frekuensi kehadiran dalam rapat gabungan, komite audit, jumlah rapat dan frekuensi kehadiran komite audit dalam rapat mengalami penurunan.
3. Sebagian besar Emiten dan Perusahaan Publik (66,11%) belum mengungkapkan keberadaan Unit Audit Internal dalam laporan tahunnya. Namun hal ini belum dapat dipastikan keakuratannya mengingat studi ini tidak melakukan konfirmasi langsung dengan Emiten dan Perusahaan Publik, studi dilakukan hanya berdasarkan penelaahan atas laporan tahunan.
4. Pengungkapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik sebanyak 68,95%. Namun informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan belum cukup memadai karena tidak dilengkapi dengan ketentuan kebijakan perusahaan mengenai penetapan remunerasi Direksi dan Komisaris.

B. Rekomendasi

1. Perlu penelaahan lebih lanjut oleh Biro PKP Sektor Jasa dan Sektor Riil bagi Emiten dan Perusahaan Publik yang belum mengungkapkan dalam laporan tahunan mengenai keberadaan komite audit dan unit audit internal sesuai dengan ketentuan Bapepam-LK yang berlaku, mengingat dalam kegiatan ini tidak dilakukan konfirmasi secara langsung terhadap Emiten dan Perusahaan publik yang tidak mengungkapkan hal tersebut dalam laporannya.
2. Untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan pengungkapannya dalam laporan tahunan perlu dilakukan sosialisasi terhadap Emiten/Perusahaan Publik terhadap pemenuhan peraturan Bapepam-LK tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan pengungkapan informasi mengenai tata kelola perusahaan, bukan saja sebagai pemenuhan kewajiban terhadap peraturan namun juga untuk meningkatkan nilai perusahaan dimata publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendry K., dan Kiel G. C. (2002) The Role of The Board in Firm Strategy: Integrating Agency and Organizational Control Perspectives. *Corporate Governance*, 12, 4, 500-520.
- Hermalin B. E., dan Welsbach M. S. (1988) The Determinants of Board Composition. *RAND Journal of Economics*, 19, 4, 598-606.
- Kaplan S. N., dan Reishus D. (1990) Outside Directorships and Corporate Performance. *Journal of Financial Economics*, 27, 389-410.
- Kep - 117/M-PBUMN/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN.
- PBI Nomor 8/14/2006 tentang Perubahan atas PBI Nomor 8/4/2006 Tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.
- Pedoman Good Corporate Governance Tahun 2006 - Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance.
- Pedoman tentang Komisaris Independen Tahun 2004 - Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance.
- Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif 2002 - Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance.
- Peraturan Bapepam-Lk Nomor IX.I.7:Pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal
- Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- www.bapepamlk.depkeu.go.id/

